

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR: 04 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

PROVINSI BENGKULU TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah pada *era reformasi telah bergeser dari sentralistik ke desentralistik, dari top down ke bottom up*, dari kesegaraman menjadi keberagaman dari budaya petunjuk menjadi budaya prakarsa dan member kewenangan yang besar kepada daerah untuk menentukan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa otonomi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; bahwa pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan system pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan melaksanakan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektif, supremasi hukum dan dapat diterima oleh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah dibentuk untuk memberikan serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam penyelenggaraannya Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pembangunan berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
 - d. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan ber sasaran, maka diperlukan dokumen sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada RPJP Nasional yang disesuaikan dengan kondisi daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a, b, c, d, f maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

nomor 4723);

11. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4739);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 140 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Ruang Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu 2005-2010 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2006 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu..
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
11. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
12. Pembangunan Daerah merupakan bagian dari kesatuan system pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka NKRI.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rancangan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disebut rancangan Senstra- SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya Rencana Kerja Rencana Kerja Perangkat Daerah

(RENJA-RKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrument kerja yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

BAB II

SISTEMATIKA DAN MATERI

Pasal 2

1. Untuk dapat memperoleh hubungan yang menyeluruh dan terpadu maka sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu disusun sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Kondisi Umum

BAB III. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025

BAB IV. Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

BAB V. Penutup

2. Materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 secara rinci terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

1. Program Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
2. Rincian dari Program Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

1. RPJPD Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. RPJPD Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pokok dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur.

BAB IV PENGENDALIAN EVALUASI

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah Melakukan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Provinsi Bengkulu.
2. Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Provinsi Bengkulu Mengacu Kepada Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu ini, materi yang belum tertampung dan tidak bertentangan dengan RPJPD ini dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

Pasal 7

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 23 – 5 2008

GUBERNUR BENGKULU

AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundang di Bengkulu
pada tanggal 23 – 5- 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

HAMSYIR LAIR

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
BAB I. Pendahuluan	1
I.1 Pengantar	1
I.2 Pengertian.....	2
I.3 Maksud dan Tujuan.....	3
I.4 Landasan	3
I.5 Tata Urut	4
BAB II. Kondisi Umum	5
II.1 Kondisi sampai dengan Tahun 2005.....	5
A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.....	5
B. Ekonomi.....	9
C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	12
D. Sarana dan Prasarana.....	13
E. Politik Dan Keamanan.....	18
F. Hukum dan Pemerintahan.....	20
G. Wilayah dan Tata Ruang.....	23
H. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	24
II.2 Tantangan.....	26
A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.....	27
B. Ekonomi.....	35
C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	36
D. Sarana dan Prasarana	36
E. Politik dan Keamanan	37
F. Hukum dan Pemerintahan.....	38
G. Wilayah dan Tata Ruang	38
H. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	40
II.3 Modal Dasar	41
BAB III. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025	43
III.1 Visi	43
III.2 Misi.....	44
BAB IV. Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025	45
IV.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025	48
IV.2 Tahapan dan Skala Prioritas.....	78
BAB V. PENUTUP	86

1.1 Pengantar

Provinsi Bengkulu berdiri pada tanggal 18 Nopember 1968 berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu. Secara historis Provinsi Bengkulu banyak memiliki hubungan emosional dengan eropa, khususnya Inggris terlihat dari banyaknya peninggalan sejarah pada masa penjajahan Inggris. Pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles tahun 1818 – 1824 Bengkulu menjadi terkenal. Pada tahun 1825 Inggris yang menguasai Bengkulu melakukan tukar menukar dengan Belanda yang menguasai Malaysia dan Singapura. Demikian juga dengan catatan sejarah pada zaman kerajaan hingga pra kemerdekaan yang dapat dilihat dalam bentuk peninggalan seperti makam Sentot Alisyabana maupun rumah kediaman Bung Karno yang menjadi Presiden pertama RI.

Provinsi Bengkulu yang beribukotakan Kota Bengkulu, memiliki luas wilayah 19.788,77 km² atau 1.978.870 ha, memanjang dari utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, ke selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung sebelah timur berbatasan dengan provinsi Jambi dan Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Provinsi Bengkulu memiliki panjang pantai 525 km, dengan wilayah terdiri dari 46,52% kawasan hutan dan suaka alam serta 53,48% peruntukan lainnya. Selain itu, Provinsi ini memiliki 7 pulau kecil di Samudera Hindia, meliputi P. Enggano, P. Satu, P. Dua, P. Merbau, P. Bangkai, P. Tikus dan P. Mega.

Secara administratif wilayah Provinsi Bengkulu dibagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota dengan luas wilayah meliputi: Kota Bengkulu 144,52 km² (0,73%), Kabupaten Bengkulu Selatan 1.179,65 km² (5,96%), Kabupaten Rejang Lebong 1.475,99 km² (7,46%), Kabupaten Bengkulu Utara 5.548,54 km² (28,04%), Kabupaten Kaur 2.369,05 km² (11,97%), Kabupaten Seluma 2.400,44 km² (12,13%), Kabupaten Mukomuko 4.036,70 km² (20,40%), Kabupaten Kepahiang 704,57 km² (3,56%), Kabupaten Lebong 1.929,24 km² (9,75%). Provinsi Bengkulu dibagi menjadi 93 kecamatan dan 1.120 desa dan 119 kelurahan, dengan jumlah penduduk adalah 1.546.286 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 88 jiwa/ km².

Krisis multidimensi yang terjadi pada tahun 1998 telah berdampak pada reformasi yang memberikan semangat politik dan cara pandang baru sebagaimana tercermin pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995. Perubahan atau amandemen UUD 1945 yang terkait dengan perencanaan pembangunan adalah a) MPR tidak diamanatkan lagi untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN); b) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; dan c) desentralisasi dan penguatan otonomi daerah.

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah berpengaruh pada pergeseran nilai-nilai pembangunan di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah Provinsi Bengkulu. Perubahan nilai yang terjadi setelah reformasi meliputi pergeseran dari sentralistik menjadi desentralistik, dari *top down* menjadi *bottom up*, dari keseragaman menjadi keragaman, dari budaya petunjuk menjadi budaya prakarsa, dan dari instruksi menjadi pilihan. Kenyataan tersebut telah member kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri. Kewenangan tersebut dijamin dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut selanjutnya disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka substansi dan esensi dari system perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan, guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan di pusat dan daerah yang lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional/Daerah, yang penyusunannya mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah.

Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan bagi kepala daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan.

RPJPD Provinsi Bengkulu memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. RPJP Nasional yang diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu membentuk pemerintah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

I.2 Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut dengan RPJPD, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJP Nasional yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Provinsi Bengkulu. Dokumen RPJPD ini mencakup visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Selanjutnya dokumen RPJPD harus dijabarkan lebih detil setiap lima tahun ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu pada setiap tahunnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat dan *stokeholder* lainnya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah jangka panjang yang tertuang dalam visi, misi dan arah pembangunan. Dokumen ini juga dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagaimana acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

Tujuan penetapan RPJPD Daerah Provinsi Bengkulu adalah agar seluruh upaya yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan senantiasa bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4 Landasan

Landasan idiil dari RPJPD Provinsi Bengkulu adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-

- undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
 10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2854);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3721);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 140 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Ruang Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu 2005-2010 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2006 Nomor 13).

1.5 Tata Urut

RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 ini disusun dalam tata urut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Kondisi Umum

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025

Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Bab V Penutup

II.1 KONDISI SAMPAI DENGAN TAHUN 2005

Bab ini mengetengahkan gambaran umum Provinsi Bengkulu yang merupakan gambaran potensi yang memiliki sebagai modal dasar pembangunan jangka panjang. Pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang social budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik dan keamanan, hukum dan pemerintahan, wilayah dan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak masalah dan tantangan pembangunan yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan untuk mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan. Masalah terbesar adalah ketertinggalan daerah, yakni dari 8 Kabupaten dan 1 kota yang ada, semua kabupaten termasuk dalam kategori daerah tertinggal dan hanya kota Bengkulu yang tidak termasuk dalam kategori kelompok ini. Pengelompokan daerah tertinggal tersebut berdasarkan atas kriteria yang dikeluarkan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang meliputi perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, karakteristik daerah dan aksesibilitas.

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Pembangunan bidang sosial budaya dan keragaman terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat Provinsi Bengkulu. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan.
 - a. Di bidang kependudukan laju pertumbuhan penduduk yaitu rata-rata per tahun 2,94% masih cukup tinggi jika dibanding rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional yaitu 2,0%. Namun kepadatan penduduk di Provinsi Bengkulu masih rendah yaitu 88 jiwa per km² pada tahun 2005. Tingginya pertumbuhan penduduk menyebabkan komposisi penduduk menjadi beban ketergantungan masih tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan rasio beban tanggungan (Dependency Ratio) tinggi yaitu rata-rata dari tahun 200 s/d 2003 sebesar 58,51%. Komposisi penduduk Bengkulu dilihat dari lapangan pekerjaan menggambarkan masih dominannya sektor pertanian dalam ketenagakerjaan. Data sensus pertanian menunjukkan bahwa 70,59% penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2005 bekerja pada sektor pertanian. Kondisi ini tidak banyak mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan data sensus rumah rumah tangga pertanian justru mengidentifikasi semakin menguatnya dominasi sektor pertanian dalam penyediaan lapangan kerja. Proporsi rumah tangga pertanian terhadap jumlah keseluruhan rumah tangga penduduk meningkat dari sebesar 54,23% (189.836 rumah tangga) pada tahun 1993 menjadi 68,15% (260.530 rumah tangga) pada

tahun 2003. Kondisi lainnya dari ketenagakerjaan adalah adanya kecenderungan meningkatnya pengangguran terbuka. Jumlah pengangguran terbuka. Jumlah pengangguran meningkat dari 29.455 orang (3,79% dari jumlah angkatan kerja) pada tahun 2000 menjadi 49.509 orang atau 6,10% pada tahun 2005).

- b. Provinsi Bengkulu secara nasional termasuk kelompok provinsi yang mempunyai Urban Rural Growth Difference (URGD) yang tinggi yaitu lebih dari 30%. Itu karena, upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk harus terus menerus dilakukan sehingga laju pertumbuhan penduduk bias menurun.
 - c. Ukuran demografi lainnya adalah tingkat kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*), yang merupakan salah satu ukuran yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat. Terjadi penurunan IMR dengan laju sekitar 2,4% per tahun, yakni dari angka 60 pada tahun 1990 menjadi 44 pada tahun 2000 dan menjadi 41 pada tahun 2002. Penurunan ini menggambarkan semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan anak. Kondisi kesehatan masyarakat yang semakin membaik ini juga tercermin pada angka harapan hidup (*Expectancy of life*).
 - d. Status kesehatan masyarakat Bengkulu secara umum masih rendah pada tahun 2002 angka kematian bayi sebesar 41, artinya bayi meninggal per seribu kelahiran bayi. Sementara indikator lainnya, yaitu angka harapan hidup di Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam periode 1990-2001 angka harapan hidup meningkat dari 63 pada tahun 1990 menjadi 65,68 pada tahun 2001, dan menjadi 66,68 pada periode 2000-2005. Namun kenyataannya status gizi balita masih rendah. Pada tahun 2005 status gizi bayi yang berada di bawah garis merah Kartu Monitor Sehat (KMS) sebanyak 21,5%. Hal ini terjadi karena rendahnya pendapatan masyarakat. Rendahnya gizi balita menjadi masalah yang serius bagi Provinsi Bengkulu untuk membentuk generasi yang unggul dan berkualitas.
 - e. Status kesehatan penduduk juga dapat ditinjau dari Angka Kesakitan penduduk Provinsi Bengkulu, yang pada tahun 2005 mengalami peningkatan dibanding keadaan tahun 2004, yaitu dari 20,98% menjadi 30,32%. Adapun rata-rata lama hari sakit selama periode 2004-2005 cenderung menurun, yaitu dari 5,85 hari menjadi 3,85 hari.
 - f. Ditinjau dari status gizi balita di provinsi Bengkulu pada tahun 2005, status gizi kurang dan gizi buruk telah mencapai 21,50%. Angka ini lebih rendah dibanding angka pada tahun 2003 yaitu 26,55%. Jika dilihat dari keberagaman data di daerah Kabupaten/Kota, balita dengan status gizi kurang dan buruk relatif lebih banyak di Kabupaten Kaur sebesar 33,65%, sedangkan status gizi normal relatif lebih banyak di Kabupaten Rejang Lebong yaitu sebanyak 82,41% dari seluruh balita. Balita dengan status gizi lebih relative banyak di Kabupaten Kepahiang, yaitu 8,07%.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus terus dilakukan, karena SDM merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Kualitas SDM harus terus diperhatikan mulai dari dalam kandungan sampai akhir hayat. Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) di provinsi Bengkulu pada tahun 2004 adalah sebesar 69,9 masih menempati urutan ke 11 secara nasional. Pada tahun 2005 IPM Bengkulu naik menjadi 71,1 namun peringkatnya turun satu tingkat. Sementara IPM adalah salah satu indikator tentang kualitas SDM yang baik. Indikator IPM ditunjukkan dengan dengan tingkat kesehatan masyarakat, tingkat pendidikan dan standar hidup yang layak atau dalam hal ini ditunjukkan dengan daya beli masyarakat atau pendapatan per kapita masyarakat. Dari ketiga indikator IPM, indeks pendidikan mempunyai kontribusi yang paling tinggi yaitu sebesar 80,91, indeks kesehatan 70 sementara indeks hidup layak sebesar 62,39 pada tahun 2005.

- a. Berbagai indikator kualitas SDM penduduk Provinsi Bengkulu membaik namun masih relatif rendah. Kualitas Sumber Daya (SDM) dapat dinilai dari aspek pendidikan, kesehatan dan moral. Ketiga aspek ini saling menunjang satu sama lain. Manusia yang berpendidikan cenderung menjaga kesehatan dan berperilaku lebih baik. Kondisi jasmani dan rohani yang sehat mendukung seseorang untuk mengikuti pendidikan. Selanjutnya, seseorang bermoral baik akan sangat mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan dan kesehatan.
- b. Apabila dilihat dari kondisi Jumlah anak usia dini di Provinsi Bengkulu umur 0-6 tahun adalah 216.286 anak, terdiri atas umur 0-3 tahun 117.842 anak, yang terdiri atas 60,328 laki-laki dan 57.604 perempuan. Jumlah anak umur 4-6 tahun adalah 98.444, yang terdiri atas 50.166 laki-laki dan 48.278 perempuan. Akses pendidikan TK/RA amat rendah yaitu tahun 2004 hanya 8%, dan tahun 2005 10%. Demikian pula peningkatan daya tampung pendidikan TK dan RA dari tahun ke tahun amat lambat, hanya 7% dari tahun 2004 ke 2005. Jumlah siswa TK tersebut masih terkonsentrasi di daerah kota Provinsi, Kabupaten dan kecamatan; sementara di daerah pedesaan amat sedikit. TK/RA hampir seluruhnya diadakan oleh organisasi masyarakat *non profit* dengan dengan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) tidak memadai dan atas dasar pengabdian. Jumlah persentase akses TK tersebut masih butuh diperjuangkan untuk dipertahankan karena berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pendidikan di TK/RA masih sangat rendah.
- c. Kualitas pendidikan pekerja di Provinsi Bengkulu ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan masih tergolong rendah. Tingkat pendidikan yang ditamatkan pekerja umumnya tidak tamat Sekolah Dasar dan tamat sekolah Dasar yaitu mencapai 55,70% pada tahun 2005. Erat kaitannya dengan tingkat pendidikan pekerja yang tergolong rendah, pekerja di Provinsi Bengkulu umumnya terserap di sektor pertanian dengan status pekerja sebagai buruh atau karyawan di perusahaan perkebunan dan sebagai pekerja keluarga.
- d. Apabila ditinjau dari aspek Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SD dan Angka Partisipasi Murni (APM) AD/MI di Provinsi Tahun 2004 sampai 2006 menunjukkan APM dan APK cukup memuaskan. Berdasarkan data, angka partisipasi kasar (APK) anak 7-12 tahun di Provinsi Bengkulu, tahun 2004 sampai 2006 mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu sekitar 2,59%. Besarnya APK tahun 2004 tersebut (105,33) menunjukkan banyaknya anak di luar umur 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan dasar. Dari tahun 2004 sampai 2006 mengalami peningkatan secara signifikan kuantitas peserta didik. Namun APM

dari tahun 2004 ke tahun 2005 menurun. Hal itu sejajar dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengalami kemerosotan, lebih-lebih sejak BBM naik. Selanjutnya ketika ada kucuran dana BOS menyebabkan peningkatan kuantitas kembali. Selain itu, adanya program paket A dan B ternyata ikut menyumbang akses dan pemerataan pendidikan, khususnya di daerah terpencil, terisolir, dan transmigrasi.

- e. Pada tingkat pendidikan tingkat SMP menunjukkan APM dan APK yang rendah. APK anak usia 13-15 tahun mengalami peningkatan sekitar 4,38%. Meskipun demikian, pada tahun 2006 APK pada kedua jenjang pendidikan masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai 98,53% untuk jenjang SD/MI; dan 77,78% untuk jenjang SLTP. Sesuai dengan kajian Rencana Pendidikan Daerah (RPD) Provinsi Bengkulu, APK yang masih rendah adalah di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong. Selanjutnya pada pendidikan tingkat SMA menunjukkan APM dan APK masih rendah. Peningkatan APK maupun APM dari tahun ke tahun masih memprihatinkan ; yaitu APK dari tahun 2004 ke 2005 meningkat 3,11 ke tahun 2006 hanya 1,43. Sedangkan APM tahun 2004 ke tahun 2005 menurun 9,11 dan ke tahun 2006 meningkat sebesar 5,22.
 - f. Jika ditinjau dari angka melek huruf penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2005 telah mencapai 89,73%. Dengan demikian masih terdapat 10,27% penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf yaitu yang tidak dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Namun, kualitas pendidikan masih jauh dari harapan masyarakat, sebagaimana tercermin dari hasil Ujian Nasional (UN) I siswa SMP?MTS dan SMA/SMK/MA, yaitu Provinsi Bengkulu tahun 2005 berada pada ranking 32 dari 32 Provinsi di Indonesia. Kualitas pendidikan tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat pada masa yang akan datang. Hal tersebut diperburuk oleh tingginya kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dengan penduduk miskin, antara wilayah perkotaan dengan perdesaan, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, dan antara laki-laki dengan perempuan. Oleh karena itu, layanan bidang pendidikan dalam hal peningkatan kuantitas, kualitas, pemerataan, dan relevansi perlu ditingkatkan agar sejajar dengan provinsi lain yang sudah maju.
 - g. Indikator pendidikan lainnya adalah rata-rata lama sekolah penduduk pada tahun 2005 adalah 8,00 tahun, yang berarti bahwa rata-rata pendidikan penduduk Provinsi Bengkulu baru pada taraf tamat SD.
4. Upaya pembangunan pemberdayaan perempuan, kependudukan dan keluarga dan pendidikan kesejahteraan sosial sudah mengalami kemajuan meskipun masih belum sesuai dengan harapan. Persentase pengangguran terbuka pada penduduk perempuan lebih tinggi daripada tingkat pengangguran pada laki-laki. Pada tahun 2003 persentase pengangguran terbuka untuk laki-laki 4,29% sementara untuk perempuan 10,66%. Posisi peranan perempuan di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di Provinsi Bengkulu saat ini sudah mulai berperan, namun masih kecil, hal ini ditandai dengan masih sedikitnya proporsi perempuan yang duduk dalam posisi strategis baik sebagai pengambil keputusan/kebijakan di bidang pemerintahan, anggota legislatif maupun di lembaga yudikatif.

5. Partisipasi pemuda dalam pembangunan juga semakin membaik seiring meningkatnya budaya olahraga di kalangan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan berhasilnya Bengkulu mendapat kehormatan memiliki kompleks asrama Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga (PPLP) pada tahun 2004. Sangat disayangkan sebagian besar masyarakat yang memiliki keahlian di bidang olahraga tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai. Jenjang pendidikan pemuda di Bengkulu masih relatif rendah hal ini masih ditandai dengan masih tingginya pemuda di Provinsi Bengkulu berpendidikan SD ke bawah pada tahun 2002 yaitu mencapai 60,55%.
6. Pemahaman masyarakat dalam berintegrasi dengan sesama sudah menunjukkan peningkatan. Masyarakat sudah banyak yang memahami tentang keragaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah melalui adat tanpa kekerasan, serta mulainya interaksi antar budaya. Kualitas layanan sebagian penyelenggara negara terhadap masyarakat masih rendah, kurang efektif, kurang efisien, dan kurang transparan sehingga menyebabkan sebagian masyarakat penuh prasangka serta lemahnya penegakan hukum semakin membuat masyarakat curiga.
7. Di bidang kehidupan beragama di Provinsi Bengkulu mayoritas penduduk beragama Islam, sisanya beragama Kristen, Katholik, Budha, dan Hindu. Secara kuantitatif kesadaran penduduk pemeluk Islam dalam melaksanakan keagamaan cukup baik. Indikator ini bias dilihat dengan banyaknya mesjid, banyaknya kaum Islam bersembahyang di mesjid apalagi di bulan puasa, meningkatnya jumlah Jemaah haji asal Bengkulu. Pada Tahun 2003/2004 jumlah jemaah haji asal Bengkulu mencapai 511 orang meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 419 orang. Namun dalam hal pengamalan agama masih kurang. Hal ini ditunjukkan banyaknya umat Islam yang belum mendalami isi Al-Quran. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran agama Islam masih jauh dari harapan untuk menjadikan masyarakat Bengkulu yang beriman dan bertaqwa. Kehidupan beragama pada masyarakat itu masih pada tataran symbol-simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama, terutama ajaran tentang etos kerja, penghargaan atas prestasi, dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan. Kesadaran di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni social dan hubungan intern dan antar umat beragama yang aman, damai, dan saling menghormati sudah cukup baik. Beberapa program telah dilakukan untuk itu, yaitu dialog intern umat beragama Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Islam.

B. Ekonomi

1. Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia, perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi periode 1993-1997 sebesar 5,47%. Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif (-6,27%) pada tahun 1998. Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal. Dampak krisis ekonomi menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 3,79% pada tahun 2000 menjadi 7,99 pada tahun 2004. Sedangkan

persentase keluarga miskin masih relatif tinggi yaitu sebesar 46% dari Total Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2005.

2. Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000-2004 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada Tahun 2005 laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,82%, meningkat 0,44% dibanding dengan tahun 2004 (5,38%). Peningkatan kegiatan ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti sebelum krisis. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Bengkulu ternyata sebagian besar kontribusinya dari sektor konsumsi rumah tangga yaitu sebesar Rp.4.011,76 milyar atau sebesar 60% dari total PDRB Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bengkulu masih mempunyai sifat yang konsumtif.
3. a. Perkembangan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang dicerminkan melalui nilai produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan dari Rp.5.595.029.000.000,- pada tahun 2003 menjadi Rp. 6.239.255.000.000,- pada tahun 2005. Sektor pertanian masih memegang peranan paling besar dalam kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 39,48%, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran 19,81%, jasa-jasa 15,67%, sektor pengangkutan dan komunikasi 9,51%, industri dan pengolahan 4,01%, sektor keuangan, persewaan dan perusahaan 4,78%, pertambangan dan penggalian 3,24%, bangunan 3,00%, dan listrik, gas dan air bersih 0,49%.
b. Kondisi ekonomi pertanian yang mendominasi perekonomian Provinsi Bengkulu pada tahun 2005 berhasil menyerap 70,59 % tenaga kerja dari total angkatan kerja. Dari masing-masing subsektor pertanian, tanaman pangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 20,56 %, diikuti oleh subsektor perkebunan (11,28 %), sedangkan subsektor peternakan dan perikanan menduduki porsi terkecil (masing-masing 3,29 % dan 4,90 %). Serapan tenaga kerja di sektor pertanian terus meningkat dari 63,04 % menjadi 70,94 % selama kurun waktu 1998-2003.
c. Sektor perikanan sampai saat ini memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 5,64 % pada tahun 2005, terjadi peningkatan sebesar 0,14 % dibanding tahun sebelumnya. Produksi perikanan laut pada tahun 2005 mencapai 29.205 ton atau baru mencapai 17,94 % dari potensi perikanan laut Provinsi Bengkulu. Potensi perikanan laut Provinsi Bengkulu sebesar 149.705 ton per tahun. Selama lima tahun terakhir produksi perikanan laut mengalami peningkatan rata-rata sebesar 666,75 ton pertahun.
4. Dilihat dari perkembangan harga-harga secara umum, perkembangan tingkat inflansi Provinsi Bengkulu yang ditunjukkan oleh Indeks Harga Konsumen (IHK), mengalami peningkatan selama tahun 2005 adalah sebesar 25,22 % atau meningkat sebesar 20,65 % dibandingkan dengan tingkat inflansi pada tahun 2004 sebesar 4,67 %. Perkembangan harga pada tahun 2005 banyak disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam harga BBM. Dalam tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak dua

kali, yaitu pada bulan Maret dan bulan Oktober tahun 2005. Keadaan ini mendorong kenaikan harga rata-rata barang dan jasa secara umum, sehingga laju inflasi Bengkulu pada tahun 2005 sangat tinggi.

5. Peran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sangat penting dalam perekonomian daerah Provinsi Bengkulu. Peran UMKM dalam perekonomian dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja. Sampai dengan September 2004, jumlah UMKM di Provinsi Bengkulu sebanyak 2.515 unit usaha, yang bagian terbesarnya berupa usaha skala mikro dan kecil mencapai 2.165 unit usaha, sedangkan sisanya berupa usaha skala menengah sebanyak 350 unit usaha. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada UMKM sebanyak 30.644 tenaga kerja dengan rincian 23.545 tenaga kerja terserap di usaha mikro dan kecil, serta sebagian tenaga kerja terserap di usaha menengah. Sementara itu sampai dengan tahun 2004, jumlah koperasi mencapai 961 unit, dengan jumlah anggota sebanyak 133.177 orang dan jumlah koperasi yang aktif sebanyak 804 unit. Perkembangan seperti itu menunjukkan bahwa UMKM mempunyai peranan besar dalam penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat di Provinsi Bengkulu.
6.
 - a. Di sektor Perbankan, jumlah dana simpanan masyarakat meningkat dari 924,553 milyar pada tahun 2000 menjadi 1,2 trilyun rupiah lebih pada tahun 2002. Suatu kenaikan dengan laju sekitar 16 % per tahun. Demikian pula jumlah penyaluran dana meningkat dari 558,50 milyar rupiah lebih pada tahun 2000 menjadi 660,87 milyar rupiah lebih pada tahun 2002. Namun demikian laju peningkatan dana simpanan lebih tinggi dari laju peningkatan penyaluran kredit. Hal ini menyebabkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurun dari 60,01 pada tahun 2000 menjadi 53,75 % pada tahun 2002.
 - b. Nilai LDR yang rendah ini dapat menyebabkan kontraksi kegiatan perekonomian daerah. Hal ini disebabkan bank umum yang ada di Provinsi Bengkulu kecuali PT. Bank Bengkulu adalah kantor cabang yang lebih difokuskan sebagai penghimpun dana, sementara kebijakan penyaluran kredit lebih banyak ditentukan oleh kantor pusat. Dengan demikian, gambaran nilai LDR ini dapat berarti terjadinya penggunaan uang dari Provinsi Bengkulu pada daerah lain. Dipihak lain, jumlah kredit bermasalah pada Bank Umum tahun 2001 mencapai 137 milyar rupiah meningkat sebesar 1,3 % jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2000. Nilai ini menyebabkan *Non-Performing Loan* (NPL) Bank Umum pada tahun 2001 adalah sebesar 22,44 %, jauh di atas kebijakan perbankan yang menghendaki nilai NPL kurang dari 5 %.
 - c. Nilai LDR dan nilai NPL di atas menggambarkan peran perankan yang masih lemah bagi pengembangan dinamika perekonomian daerah sekaligus persoalan yang dihadapi mereka. Dalam hal ini diperlukan suatu terobosan yakni memberikan pinjaman kredit pada pihak perbankan, dapat berupa pendirian lembaga penjaminan kredit daerah atau lainnya.
 - d. Gambaran keuangan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2004 dapat dilihat dari struktur Anggaran dan Belanja Daerah (APBD). Secara umum perkembangan nilai APBD Provinsi Bengkulu selama sepuluh tahun terakhir, menunjukkan *trend*

meningkat. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan diberbagai bidang/sector dan tuntutan penyediaan pelayanan untuk kepentingan public. Peningkatan APBD tidak saja dari sisi pendapatan, tetapi juga dari sisi pengeluaran, baik pengeluaran rutin, maupun untuk pembangunan.

- e. Dilihat dari sisi penerimaan daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam lima tahun terakhir rata-rata realisasi penerimaan daerah meningkat sebesar 25,67% per tahun. Sementara itu dari sisi pengeluaran daerah, selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 28,06% per tahun. Untuk menjaga tersedianya dana guna membiayai belanja daerah, maka pemerintah daerah harus berusaha mengintensifikasi penerimaan dari sumber daerah sendiri, baik dari pajak daerah, retribusi daerah maupun dari penerimaan lainnya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.
- f. Penerimaan yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan *trend* peningkatan Secara keseluruhan selama lima tahun terakhir peningkatan PAD mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar rata-rata 55,04% per tahun. Penerimaan total APBD Provinsi Bengkulu pada tahun 2005 sebesar Rp. 394,29 milyar. Sumbangan PAD terhadap total APBD hanya sebesar Rp. 104,92 milyar atau sebesar 27,88% dari total penerimaan, sementara dari Dana Alokasi Umum Rp. 222,62 milyar atau 56,46%. Kalau dilihat nilai nominal APBD nampak terjadi suatu peningkatan yang cukup tinggi, peningkatan ini terutama berasal dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah. Meskipun nilai PAD Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, namun nilai nominal PAD masih relatif rendah jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Sementara itu penerimaan yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kontribusinya masih relatif kecil. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan daerah yang cukup signifikan dari sumber PAD, sumber keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu masih sangat tergantung kepada subsidi pemerintah pusat melalui pos Dana Perimbangan. Pada tahun 2004 penerimaan daerah yang berasal dari pos dana perimbangan mencapai Rp. 239.606.415.346 atau sebesar 67,96% dari total pendapatan daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari segi pendanaan pembangunan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu masih sangat tergantung dari pemerintah pusat. Dengan kondisi keuangan daerah seperti ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan menyediakan pelayanan dasar untuk kepentingan publik. Bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan pembangunan di Provinsi Bengkulu.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengalami peningkatan. Berbagai hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa teknologi telah mulai dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Jumlah publikasi ilmiah terus meningkat, meskipun tergolong masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan peningkatan kegiatan penelitian, transparansi ilmiah dan aktivitas

diseminasi hasil penelitian dan pengembangan. Namun demikian kemampuan daerah dalam meningkatkan daya saing. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh masih rendahnya sumbangan IPTEK di sektor produksi, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya IPTEK.

D. Sarana dan Prasarana

Infrastruktur merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di semua bidang. Infrastruktur transportasi berfungsi sebagai pelayanan dalam penyediaan jasa transportasi yang berguna untuk mendorong pemerataan pembangunan, baik di perkotaan maupun pedesaan dan memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi. Transportasi sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Pada bidang pendidikan, transportasi mempeunyai peranan yang sangat penting sebagai alat untuk memperlancar mobilitas angkutan pelajar dan mahasiswa. Sementara prasarana irigasi merupakan faktor pendukung utama dalam pembangunan bidang pertanian terutama yang berhubungan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan.

Prasarana bidang ketenagalistrikan berfungsi sebagai roda penggerak perekonomian terutama diperlukan untuk mendukung pengembangan bidang industri, jasa dan telekomunikasi. Bidang telekomunikasi merupakan prasarana untuk mempercepat mendapatkan informasi, baik informasi dalam perdagangan, pasar, pendidikan, teknologi dan pelayanan jasa. Prasarana air bersih merupakan upaya memberikan akses secara adil dan terjangkau kepada seluruh masyarakat untuk memberikan akses secara adil dan terjangkau kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Infrastruktur bidang perumahan merupakan kebutuhan pokok. Perumahan yang layak, sehat, aman dan terjangkau bagi semua golongan masyarakat yang sangat diperlukan untuk melangsungkan kehidupannya.

1. Sarana transportasi jalan yang ada di Provinsi Bengkulu, tingkat perkembangannya masih sangat lambat yaitu dengan penambahan panjang rata-rata pertahun pada periode 1995-2000 dan 2000-2005 hanya sekitar 1,24 % dengan tingkat aksesibilitas dan mobilitas jalan masing-masing sebesar 0,31 km/k-M² dan 3,96 km/1000. Keduanya masih di atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) yakni 0,05 dan 0,5. Panjang jalan keseluruhan dan status jalan yang tersebar di wilayah Provinsi terdiri atas panjang Jalan Negara pada tahun 1991 sepanjang 491,72 km dan pada tahun 1992-1994 sepanjang 727,62 km tidak mengalami penambahan dan pada tahun 1995-2004 total jalan nasional sepanjang 750,43 km (11,72%) juga tidak mengalami penambahan panjang; panjang jalan provinsi pada tahun 1991-1994 sepanjang 478,99 km, tahun 1995-1997 sepanjang 921,61 km, tahun 1998-2001 sepanjang 1.366,63 dan tahun 2002-2004, sepanjang 1.574,63 km atau (24,59 %); sedangkan jalan kabupaten/kota sepanjang 4.077,03 km (63,68%. Kondisi jalan nasional semuanya sudah menggunakan aspal hotmix, sementara kondisi jalan provinsi sepanjang 1.347,03 km atau 89,41 % sudah menggunakan aspal hotmix dan penetrasi dan

159,58 km atau 27,76 % masih menggunakan base. Sedangkan untuk jalan kabupaten rata-rata masih menggunakan aspal penetrasi dan base.

Kondisi permukaan jalan nasional sebagian besar sudah banyak yang rusak, dari 750,43 km panjang keseluruhan, sepanjang 200,60 km atau 27,24 % dalam kondisi rusak berat dan sepanjang 213,59 km atau 29,00 % dalam kondisi rusak ringan. Adapun kondisi jalan provinsi rata-rata sudah banyak yang rusak dan tergolong tidak mantap. Sepanjang 415,70 km atau 26,39 % jalan provinsi sudah mengalami kerusakan, jalan rusak terpanjang terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu 182,19 dari 438,65 km panjang total. Proporsi tertinggi antara permukaan jalan provinsi yang mantap dan tidak mantap terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu 155,00 dari 158,20 km panjang total, diikuti Kabupaten Mukomuko sepanjang 41,00 dari 43,62 km panjang total dan Kota Bengkulu sepanjang 48,18 dari 57,18 km panjang total.

2. Sarana transportasi kereta api yang beroperasi secara khusus untuk komersial pada saat ini belum tersedia di Provinsi Bengkulu, namun baru tersedia jaringan rel kereta api yang melewati Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan perlintasan dari jalur jalan rel Palembang-Prabumulih-Lubuk Linggau. Selain itu, terdapat juga jalan rel kereta api khusus di Kecamatan Ketahun/Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, yang dimanfaatkan untuk kegiatan badan usaha pertambangan emas di wilayah Lebong Tandai Kabupaten Lebong, yang menghubungkan antara wilayah Napal Putih dan wilayah Lebong Tandai. Dalam rencana jangka panjang, sarana ini akan dikembangkan menjadi sistem pelayanan angkutan kereta api yang lebih menjangkau wilayah-wilayah di Provinsi Bengkulu.
3. Sarana transportasi udara di Provinsi Bengkulu pelayanannya hanya dilakukan oleh bandara Fatmawati Soekarno, yang hanya data didarati oleh pesawat jenis Boeing 737-200, dengan panjang runway 2.250 meter. Dalam RTRW dan SISTRANAS, bandara fatmawati ditetapkan sebagai pusat penyetersier. Rute penerbangan yang dilayani pada saat ini hanya Bengkulu Jakarta PP dan Bengkulu-Palembang. Banyaknya lalu lintas penumpang di Fatmawati-Soekarno dalam periode 1999-2003 meningkat dari 16.529 menjadi 46.230 untuk kedatangan dan dari 15.679 menjadi 50.523 untuk keberangkatan. Laju peningkatan lalu lintas penumpang angkutan udara tertinggi terjadi antara tahun 2002 dan 2003. Selain bandara Fatmawati di wilayah Provinsi Bengkulu terdapat pula bandara printis, yaitu di Kabupaten Mukomuko dengan panjang runway 1.000 meter. Dengan adanya rencana pengembangan kawasan Pulau Enggano secara terpadu dan pengembangan wilayah Kabupaten Kaur sebagai fungsi daerah pariwisata dan perikanan, untuk ke depan perlu dikembangkan sarana transportasi udara guna mendukung tercapainya fungsi tersebut.
4. Angkutan penyeberangan di wilayah Provinsi Bengkulu terdapat di kota Bengkulu dengan Pulau Enggano. Dermaga penyeberangan di kota Bengkulu terletak di komplek Pelabuhan Pulau Baai, dan dermaga penyeberangan di Pulau Enggano yaitu Kahyapu. Sedangkan jenis kapal yang dioperasikan untuk penyeberangan adalah jenis kapal R0-Ro (Roll on-Roll). Selain rute penyeberangan Pulau Baai-

Kahyapu tersebut, akan dikembangkan juga di masa yang akan datang rute-rute baru untuk mendukung system wilayah pariwisata.

5. a. Sarana transportasi laut yang terdapat di Provinsi Bengkulu adalah Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu, Pelabuhan Malakoni di Pulau Enggano dan Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur. Kondisi Pelabuhan laut Pulau Baai saat ini hanya memiliki kedalaman rata-rata -3,8 meter MLWS (minus 3,8 meter *Low Water Spring*), dengan *Break Water* sebelah kanan alur sepanjang 420 meter, dengan tinggi +4,7 meter. Sedangkan *Break Water* sebelah kiri alur sepanjang 395 meter dengan tinggi +4,7 meter. Pelabuhan Pulau Baai mempunyai luas daratan 1.200 Ha, dan kolam pelabuhan seluas 1.000 Ha, serta alur masuk pelabuhan sepanjang 800 meter. Pelabuhan Pulau Baai mempunyai 3 dermaga umum, yaitu dermaga samudra yang berukuran 165 m x 18 m, dermaga Nusantara yang berukuran 84 m x 18 m, dan dermaga Lokal berukuran 124 m x 10 m. Sedangkan fasilitas lapangan penumpukan yang tersedia di dermaga Samudra seluas 1.100 m² dan dan dermaga local ataupun dermaga Nusantara seluas 6.742 m². Fasilitas penunjang untuk bongkar muat tersedia 2 unit *conveyor belt* yang berkapasitas 500 dan 1.000 ton/jam, crane jumbo yang berkapasitas 25 ton serta 3 unit forklif dan 4 buah *hoper box*.
 - b. Kondisi alur yang sangat dangkal (-3,8 meter MLWS) disebabkan oleh adanya proses sedimentasi. Pendangkalan tersebut telah menyebabkan terhambatnya aktivitas bongkar muat barang, sehingga pelayanan tidak dapat dioptimalkan. Untuk penanggulangan pendangkalan ini diperlukan pengerukan pada alur pelabuhan dan juga perlunya peninggian dan penambahan panjang bangunan *Break Water*. Meskipun terdapat berbagai hambatan dalam pelayanan, aktivitas lalu lintas dan bongkar muat barang di Pelabuhan Pulau Baai periode tahun 1993-1997 meningkat dari 63.431 menjadi 78.064 untuk bongkar, dan 31.786 menjadi 41.947. sedangkan pada tahun 2000-2004 meningkat secara signifikan. Jumlah kunjungan kapal meningkat dari 501 menjadi 607 unit, dan jumlah penumpang meningkat dari 7.059 menjadi 10.664 orang. Jumlah bongkar muat sempit menurun dari 308.199 pada tahun 2000 menjadi 87.227 pada 2001, lalu meningkat lagi menjadi 188.536 pada 2004. Dinamika yang sama dialami jumlah muat barang yang sempit menurun dari 137.199 menjadi 87.227 ton dan meningkat menjadi 188.536 ton dari periode yang sama.
 - c. Pelabuhan Linau, Makoni dan Kahyapu merupakan pelabuhan-pelabuhan yang masih berskala kecil (pelabuhan pengumpanan lokal) yang melayani pelayaran antar pulau (*interinsuler*), dimana kapasitas dan kelengkapan yang ada belum cukup memadai. Pelabuhan Linau pada saat ini hanya dimanfaatkan untuk melayani pengangkutan kayu log dan pelayaran kapal perintis. Sedangkan Pelabuhan Malakoni dan Kahyapu di Pulau Enggano dewasa ini hanya di dimanfaatkan untuk penyaluran sembako dan mengantar penumpang dari dan menuju Pulau Enggano.
6. Prasarana irigasi merupakan faktor pendukung utama dalam pembangunan bidang pertanian terutama yang berhubungan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan. Kondisi pada saat ini di Provinsi Bengkulu terdapat di

Provinsi Bengkulu terdapat 712 daerah irigasi dengan luas potensial 110.792 Ha, yang terdiri dari 20 daerah irigasi dengan luas potensial 41.117 Ha, 181 daerah irigasi semi teknis dengan luas potensial 27.437 Ha, dan 511 daerah irigasi sederhana/desa dengan luas potensial 42.238 Ha. Prasarana irigasi lain adalah pengembangan daerah rawa dengan luas potensial 23,780 Ha, terdiri dari 11 daerah rawa yang tersebar di wilayah Provinsi Bengkulu. Dari luas total areal daerah irigasi dan daerah rawa yang telah dikembangkan luas fungsional yang ada mencapai 78.174 Ha untuk daerah irigasi dan 19.11 Ha untuk daerah rawa, sehingga luas total barunya mencapai 97.284 Ha. Daerah irigasi tersebut terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah dataran tinggi terdapat di wilayah Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan sebagian di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Mukomuko. Sedangkan daerah irigasi dataran rendah terdapat di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu.

7. a. Di bidang kelistrikan, pelayanan energi listrik di Provinsi Bengkulu pada saat ini masih tergolong sangat rendah. Pelayanan yang ada sebagian besar berada pada wilayah perkotaan. Pembangkit listrik yang ada terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Pembangkit Listrik Tenaga Air yang beroperasi pada saat ini hanya PLTA Tes yang mempunyai kapasitas sebesar 18.960 KW. Sedangkan PLTA Musi yang dirancang berkapasitas lebih besar (3 x 70.000 KW) akan difungsikan tahun 2006. Kedua Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ini akan merupakan bagian dari jaringan Pembangkit Listrik Sumatera Bagian Selatan (interkoneksi Sumbagsel). PLTD rata-rata digunakan pada daerah-daerah kabupaten, dimana kapasitas yang ada masih sangat terbatas. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta seperti perkebunan dan industry, tetapi kapasitas yang dipakai hanya dapat melayani sebatas lokasi area perkebunan.
- b. Perkembangan jumlah produksi listrik dan jumlah listrik yang terjual dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2000 jumlah produksi listrik sebanyak 203,437 juta Kwh, dengan penjualan sebesar 173,106 juta Kwh. Sedangkan produksi pada tahun 2001, 2002, 2003 mengalami peningkatan, berturut-turut sebesar 220,610 juta, 229,753 juta, dan 245,128 juta Kwh dengan penjualan sebanyak 183,524 juta, 189,084 juta dan 200,586 juta Kwh.

Banyaknya daya yang terpasang menurut jenis pelanggan di Provinsi Bengkulu dari tahun 1998-2002 didominasi oleh rumah tangga dengan jumlah pelanggan yang terus meningkat dari 78.694 menjadi 103.364. Jumlah pelanggan sosial juga meningkat dari 5.266 menjadi 5.455 dan pelanggan gedung/kantor dari 3.838 menjadi 4.192 dalam kurun waktu yang sama. Banyaknya daya terpasang untuk pelanggan sosial dan kantor/gedung sempat mengalami kenaikan drastis pada tahun 1999 dan 2000, kemudian turun pada tahun 2001, lalu naik kembali pada tahun 2002.

8. a. Pelayanan terkomunikasi (telepon) yang ada pada saat ini masih sangat terbatas, dari 31.875 SST (Satuan Sambungan Telepon), sebesar 60 % tingkat pelayanan ada di perkotaan dan sebesar 40 % lagi tersebar di beberapa kabupaten, diantaranya Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedangkan untuk Kabupaten yang baru pemekaran, jaringan telepon yang ada hanya bersifat semi otomatis. Selain telepon kabel, terdapat juga jaringan telepon seluler yang dihubungkan dengan tower sebagai menara penghubung.
 - b. Pemanfaatan teknologi telematika masih sangat terbatas pada instansi pemerintah dan swasta atau badan usaha milik Negara di kota, terutama Kota Bengkulu, sedangkan di kota-kota kabupaten dan kecamatan belum ada. Di Kota Bengkulu sarana telematika telah dimanfaatkan, terutama untuk mengakses data/informasi nasional maupun internasional, tetapi pemanfaatannya juga masih terbatas. Di sisi lain, penyediaan jaringan telematika ke kota-kota kabupaten dan kecamatan masih sangat minim. Demikian juga ketersediaan dan kesiapan SDM baik yang terampil mengenai *hardware* maupun *software*, belum banyak dimiliki oleh instansi pemerintah. Aplikasi telematika belum dikembangkan di Bengkulu, sehingga akses informasi/data antar instansi di tingkat Provinsi, maupun kabupaten belum dapat dilakukan melalui sistem telematika. Informasi tentang Bengkulu yang dibutuhkan oleh masyarakat masih sangat sedikit yang dapat diakses oleh masyarakat melalui jaringan telematika.
9. Kondisi perumahan pada tahun 2004 tercatat sebanyak 291.315 unit, terdapat di perkotaan sebesar 101.193 unit dan perdesaan sebesar 190.122 unit. Sedangkan di perkotaan yang belum memiliki perumahan sebanyak 35.208 KK dan daerah perdesaan sebanyak 21.125 KK. Kondisi perumahan di perdesaan masih mayoritas mempunyai rumah yang belum layak huni, yakni masih menggunakan rumah semi permanen. Pembangunan perumahan dilaksanakan melalui Perum Perumahan Nasional cenderung menurun. Pada tahun 1994-1995 sebanyak 1.018 unit dan pada tahun 1995-2000 berturut-turut menurun menjadi 610 unit, 228 unit, 65 unit, 276 unit, 100 unit, dan terakhir dilaksanakan pembangunan pada tahun 2001-2002, sebanyak 30 unit.
10. a. Produksi air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Provinsi Bengkulu terdapat di beberapa kabupaten dan kota, antara lain Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Selatan. Kapasitas air baku yang berjalan pada saat ini di Kota Bengkulu adalah sebesar 160 l/dt, dengan kapasitas produksi rata-rata setiap bulan sebesar 333.218 m³. Dari jumlah tersebut sebanyak 94,7 % didistribusikan pada meteran induk, selanjutnya dari meteran induk sekitar 70,3 % tercatat pada rekening penjualan, sisanya sebesar 0,17 % tidak terjual. Berdasarkan catatan rata-rata produksi air baku pada setiap bulan mempunyai pH berkisar 6,7-7,8 dengan tingkat kekeruhan 25-3750 ntu. Tingkat kekeruhan yang tinggi terjadi pada musim hujan karena banyak sedimen (lumpur) yang terbawa dari hulu.
 - b. Kapasitas layanan pada saat ini di Kota Bengkulu adalah sebanyak 10.290 sambungan atau baru mencapai 17,7 % dari jumlah rumah tangga yang ada,

dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4,8 orang. Saat ini ada dua *Intake* yang beroperasi yaitu *Intake* Sungai Nelas dan Sungai Bengkulu. Air yang dikonsumsi pelanggan adalah sebesar 221.891 m³/bulan yang tercatat pada rekening penjualan, dengan harga rata-rata Hidran Umum (HU) Rp.800/m³. Sedangkan pada daerah kabupaten-kabupaten tingkat pelayanan masih relatif kecil atau baru mencapai 10% dan harga air untuk Hidran Umum (HU) masih bervariasi antara Rp.400/m³ sampai dengan Rp.600/m³.

E. Politik dan Keamanan

1. a. Perkembangan proses demokratisasi sejak tahun 1995 hingga selesainya Pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi.

Amandemen UUD 1945 yang kemudian memberikan ruang diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik sebagai penjabarannya telah merumuskan format politik baru bagi kelembagaan demokrasi. Secara tegas amandemen UUD 1945 telah menata kembali kewenangan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk di dalamnya kekuasaan dari lembaga-lembaga yang baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah. Penataan tersebut telah memberikan peluang kearah terwujudnya keseimbangan kekuasaan. Lebih lanjut, format politik ini terumuskan juga berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

- b. Berkenaan dengan Pemilu, keberhasilan penting yang telah diraih adalah telah dilaksanakannya Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, aman dan demokratis pada tahun 2004. Hal ini merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya. Kemudian di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu, telah dilakukan pemilu langsung untuk memilih kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) dan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2005, sebagai perwujudan pelaksanaan dari peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannya format hubungan pusat-daerah yang baru berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang pada intinya lebih mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengatur mengenai hubungan wewenang

antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota.

- d. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak sah masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik. Perkembangan ini tidak terlepas dari berkembangnya peran partai politik dan masyarakat sipil. Disamping itu kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- e. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan terus berlanjut untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir. Dari hasil aktualisasi sistem demokrasi tersebut tingkat kesadaran berdemokrasi bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk menentukan kebijakan publik masih relatif rendah. Secara umum untuk Provinsi Bengkulu masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sampai saat ini diprediksikan berkisar 30-40% pada putaran pertama dan 30-35 pada putaran kedua.

Mekanisme pelaksanaan Pilkada diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Apabila dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah terjadi sengketa terhadap penetapan hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan. Di beberapa daerah yang telah melaksanakan Pilkada, hasil akhir perhitungan suara yang dilakukan oleh KPUD tidak dapat diterima oleh pasangan calon kepala daerah, sehingga berlanjut pada aksi demonstrasi dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

2. a. Gerakan reformasi pada tahun 90'an menghendaki perubahan secara total di segala bidang penyelenggaraan negara termasuk tuntutan terhadap reposisi TNI dan Polri. Penyempurnaan terhadap reposisi dan peran TNI dan Polri dikukuhkan melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR tersebut di perkuat lagi dengan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan Negara, UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun demikian, reposisi tersebut juga berdampak pada ketidakterkaitan masalah pertahanan dengan masalah keamanan dalam negeri yang seharusnya bersama-sama dengan keamanan sosial merupakan satu kesatuan satu kesatuan dalam keamanan nasional.
- b. Di Provinsi Bengkulu saat ini keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan pembangunan

daerah. Berdasarkan data yang ada ternyata tingkat kerawanan keamanan di Provinsi Bengkulu cukup tinggi. Secara keseluruhan, jumlah peristiwa kriminal meningkat dari 1.322 pada tahun 2000 menjadi 1.754 pada tahun 2004. Jenis-jenis peristiwa kriminal yang mengalami peningkatan secara dratis dalam kurun waktu yang sama adalah pencurian berat (dari 380 menjadi 474), penganiayaan (dari 76 menjadi 215) dan narkoba (dari 26 menjadi 62). Namun demikian, tingkat kriminalitas sempat mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2002 dan 2003, yakni masing-masing mencapai 2.024 dan 1.984 kasus untuk jenis kriminal secara total. Sementara jenis peristiwa kriminal yang mengalami penurunan adalah pencurian kendaraan bermotor (dari 199 menjadi 89) dan pencurian dengan kekerasan (dari 72 menjadi 63).

- c. Berdasarkan data tersebut, tingkat kerawanan tindak pidana di Bengkulu cukup tinggi, terutama yang sangat pesat peningkatannya seperti narkoba, illegal logging, penganiayaan terhadap orang, perjudian, pembunuhan, senjata api, pemerkosaan dan pencurian hampir setiap tahun terjadi peningkatan. Kasus yang tersebut di atas merupakan kasus yang hanya masuk pada laporan polisi, sebenarnya banyak kasus-kasus yang tidak sampai pada polisi karena berbagai faktor yang menyebabkan tidak terdata, antara lain pihak korban tidak mengerti hukum, masyarakat tidak mau repot untuk melapor, tenaga personil polisi masih sangat kurang sehingga tidak dapat memantau secara cermat apa yang terjadi di masyarakat. Kekurangan tenaga personil polisi terlihat dari rasio jumlah penduduk dan personil polisi di Bengkulu pada tahun 2004 hanya 1 : 459.

F. Hukum dan Pemerintahan

- a. Perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah sejak tahun 1995 hingga selesai Pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa sentralistik ke desentralistik pelaksanaan otonomi daerah. Amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan sebanyak empat kali telah mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara baik pada tataran suprastruktur maupun infrastruktur politik. Amandemen UDD yang kemudian memberikan ruang ditertibkannya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah sebagai penjabaran dari ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Penataan tersebut telah memberikan peluang ke arah terwujudnya keseimbangan kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dirumuskan pada ketentuan Undang-Undang tentang otonomi Daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.

Pembangunan bidang pemerintahan umum terkait erat dengan pelayanan publik dan penerapan birokrasi untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Kondisi pemerintahan umum daerah dapat tercermin pada aspek jumlah infrastruktur yang tersedia dan pelaksanaan birokrasi dalam mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien.

- b. Provinsi Bengkulu memiliki 8 Kabupaten dan 1 kota yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu

Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Mukomumo, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lebong. Semenjak dilaksanakan otonomi daerah, di wilayah Provinsi Bengkulu telah terjadi pemekaran wilayah baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa atau kelurahan. Berdasarkan data saat ini Provinsi Bengkulu telah memiliki 93 kecamatan, 119 kelurahan dan 1.120 desa. Berdasarkan data saat ini Provinsi Bengkulu telah memiliki 93 kecamatan, 119 kelurahan, dan 1.120 desa.

Batas Provinsi Bengkulu dengan Provinsi tetangga adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan Sumatera Selatan panjang garis batas (KM) 511, sepanjang (KM) 245 telah dilakukan pengukuran dan tersisa (Km) 266 belum diukur.
 - 2) Dengan Jambi panjang garis batas (KM) 134, telah diukur sepanjang (Km) 134.
 - 3) Dengan Sumatera Barat panjang garis batas (Km) 39, telah dilakukan pengukuran sepanjang (KM) 39
 - 4) Dengan Lampung panjang garis batas (KM) 32 dan diukur sepanjang (Km) 32.
- Secara keseluruhan panjang garis batas Provinsi Bengkulu dengan tetangga adalah 716 km. Sepanjang 450 km telah diukur dan tersisa 266 km belum terukur.

Secara keseluruhan panjang garis batas Provinsi Bengkulu dengan tetangga adalah 716 Km. Sepanjang 450 Km telah diukur dan tersisa 266 Km belum diukur.

- c. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu telah memiliki kelembagaanyang berfungsi untuk membantu dan mendukung jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kelembagaan pemerintah Provinsi Bengkulu terdiri atas secretariat daerah, dinas/instansi, badan-badan, kantor-kantor dan sejumlah UPT. Untuk melaksanakan pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh secretariat daerah, 19 dinas/instansi,9 badan dan 3 kantor lembaga.
- d. Sumber daya aparatur pemerintahan secara keseluruhan mencapai sebanyak 6.642 orang, dengan rincian gol I berjumlah 146 orang, gol II berjumlah 2.558 orang, gol III 3.658 orang dan gol IV berjumlah 280 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan berdasarkan sumber data pada Bengkulu dalam angka 2003 PNS daerah di Provinsi Bengkulu dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 155 orang (LK), 21 orang (Pr), SLTP sebanyak 106 orang (Lk), 30 oarang (Pr), SLTA sebanyak 1.624 orang (Lk) serta 833 orang (Pr), D3 448 orang (Lk), 203 orang (Pr),S1 1.352 orang ,415 orang 9Pr), S2 82 orang (Lk), 15 orang (Pr) dan S3 sebanyak 1 orang (Lk).
- e. Pelaksanaan pemerintahan daerah dengan sistem sentralistik berubah menjadi desentralistik sebagaimana yang diinginkan dalam ketentuan Undang-Undang Otonomi daerah yang pelaksanaannya hingga saat ini masih menimbulkan berbagai permasalahan terutama menyangkut batas kewenangan daerah dalam melaksanakan berbagai urusan. Permasalahan tersebut antara lain belum terlaksana dengan baik koordinasi pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mengambil suatu kebijakan antar pemerintah provinsi dengan daerah kabupaten dan kota. Selain itu, dalam melaksanakan pemerintahan masih dirasakan beum terciptanya pelaksanaan good governace, hal ini terlihat dengan masih rendahnya

etos kerja aparatur, rendahnya profesionalisme apartur dan masih adanya diskriminasi dalam pelayanan publik.

Upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan *good governance* dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun demikian hasil yang dicapai belum cukup menggembirakan. Kelembagaan pemerintah yang tersedia di daerah masih belum terlihat efektif dalam membantu pelaksanaan tugas dan system manajemen pemerintahan daerah juga belum efisien dalam menghasilkan dan menggunakan sumber-sumber daya. Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi masih belum sepenuhnya dapat teratasi mengingat keterbatasan dana pemerintah daerah.

- f. Pada bidang keimigrasian di Provinsi Bengkulu telah melakukan pelayanan terhadap orang asing untuk tinggal di Bengkulu dan warga negara yang hendak mengurus paspor dalam rangka ke luar negeri. Jumlah orang asing yang memegang KITAS tahun 2001 sebanyak 47 orang dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2005 menjadi 42 orang, yang masing-masing berasal dari USA, Jepang, Hongkong, Malaysia, RRC, Thailand, Australia, Taiwan, Austria, dan India. Sedangkan pemberian paspor RI pada tahun 2001 sebanyak 1.217, dan meningkat menjadi 4.190 pada tahun 2005.
2. a. Dalam era reformasi upaya perwujudan Sistem Hukum Nasional terus dilanjutkan mencakup: (a) Pembangunan substansi hukum baik hukum tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat yaitu berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut, proses pembentukan hukum dan peraturan Perundang-Undangan dapat diwujudkan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan dengan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan Perundang-Undangan serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan; (b) Penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan, terakhir dengan Amendemen keempat UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar di bidang kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai hak menguji UU terhadap UUD 1945 dan Komisi Yudisial yang akan melakukan pengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim. Peningkatan kemandirian hakim berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman membawa perubahan bagi terselenggaranya *check and balances* dalam penyelenggaraan Negara dengan beralihnya kewenangan administrative, organisasi, dan keuangan lembaga peradilan kepada Mahkamah Agung. Dengan dibentuknya komisi Yudisial yang komposisi keanggotaannya cukup representative, maka pengawasan dan control terhadap kemandirian lembaga peradilan, pembentukan sistem hukum nasional dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien; dan (c) Pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.
 - b. Perwujudan Sistem Hukum Nasional yang telah dilakukan oleh Pemerintah mempengaruhi juga terhadap sistem hukum yang berlaku di Daerah. Oleh sebab

itu, dalam pembentukan Peraturan Daerah tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu yang ada sekarang ini secara keseluruhan belum bisa mencakup semua aspek kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan inventarisasi terhadap Perda yang ada untuk dilakukan penyempurnaan dan pembuatan Peraturan Daerah yang belum tersedia.

Hingga berakhirnya pelaksanaan berbagai program pembangunan yang terdapat dalam Program Pembangunan Provinsi Bengkulu 2000-2004, masih dihadapi beberapa masalah dalam penyelenggaraan daerah dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut antara lain masih terjadinya praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dan belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi dan berkualitas. Dalam empat tahun terakhir terdapat tindak pidana korupsi sebanyak 17 kasus. Sedangkan tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi dalam kurun waktu 2000 s/d 2004 sebanyak 60 kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Bengkulu cukup tinggi. Berdasarkan pengamatan pada tingkat proses di Pengadilan, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih belum dapat memuaskan harapan rasa keadilan masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar kasus korupsi yang diproses di Pengadilan dinyatakan bebas atau tidak terbukti. Keadaan demikian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi masih sangat lemah.

G. Wilayah dan Tata Ruang

1. Perwilayahan dan penataan ruang Provinsi Bengkulu merupakan dokumen perencanaan daerah yang pertama kali dibuat sehingga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan selanjutnya. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan di suatu daerah atau wilayah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutannya. Pembangunan harus berorientasi pada keuntungan ekonomi yang panjang agar tidak menimbulkan eksploitasi SDA secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas SDA dan lingkungan hidup. Penataan ruang juga diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, seperti antara kehutanan dan pertambangan. Konflik antar sektor tersebut dapat dihindari melalui penerapan 'Rencana Tata Ruang' sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.
2. Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diikuti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah memberikan implikasi pada hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota yang baru. Selain itu, terbentuknya kabupaten-kabupaten baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 (Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 (Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang) telah berdampak pada perubahan pola perwilayahan dan penataan ruang di Provinsi Bengkulu. Oleh sebab itu, perlu

dilakukan perumusan kebijaksanaan tentang wilayah dan tata ruang pasca pemekaran agar pembangunan berjalan efektif.

H. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. a. Provinsi Bengkulu terletak di antara $2^{\circ}16-5^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}00'-103^{\circ}50'$ Bujur Timur (berdasarkan pembacaan pada Peta Rupa Bumi BAKOSORTANAL skala 1 :250.000). wilayah ini berada di bagian barat Sumatera bagian Selatan dengan ketinggian 0-1.200 m dari permukaan laut. Fisiografi wilayah Provinsi Bengkulu di Pulau Sumatera (Mainland) terdiri atas jalur dataran rendah yang tidak begitu lebar dan membentang dari ujung utara sampai ujung selatan, disusul oleh jalur dataran tinggi yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Bentuk wilayah relatif memanjang sejajar garis pantai sepanjang 525 km. Sementara lebar daratan dari garis pantai bervariasi, dari yang tersempit sekitar 32,5 km (di sekitar perbatasan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan).

b. Karakter geomorfologi di Provinsi Bengkulu sebagaimana telah dijelaskan, berpengaruh terhadap arah dan pola aliran sungai. Ada 3 pola aliran sungai utama yang terdapat di Provinsi Bengkulu, yakni :

- Sungai-sungai yang mengalir ke Samudera Hindia atau ke arah barat,
- Sungai-sungai yang mengalir ke Selat Bangka atau ke arah timur; dan
- Sungai-sungai di Pulau Enggano yang mengalir ke Samudera Hindia.

Sebagian dari sungai-sungai tersebut mencakup wilayah antar-provinsi, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Manjuntjo (hulunya di Provinsi Jambi), DAS Musi (hilirnya di Provinsi Sumatera Selatan), DAS Manna, DAS Luas (hulunya di Provinsi Sumatera Selatan), dan DAS Manula (hulunya di Provinsi Lampung). Dihubungkan dengan karakter geomorfologi dan iklim di wilayah Provinsi Bengkulu, di bagian hulu daerah-daerah aliran sungai di atas seharusnya berfungsi sebagai kawasan hutan lindung agar dapat memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

c. Secara geomorfologi atau bentukan permukaan bumi maka wilayah Provinsi Bengkulu memiliki 4 karakter utama, yakni :

- Dataran Pantai, yang terdapat di sepanjang pantai, membentang dari Kabupaten Mukomuko sampai Kabupaten Kaur;
- Dataran Aluvial, yang memanjang di belakang dataran pantai, lebar 5-10 km, dan memiliki kesuburan tanah yang cukup tinggi;
- Zona Lipatan, yang memanjang sejajar dan di belakang dataran alluvial, dengan ketinggian 100-400 m dari permukaan laut;
- Zona Vulkanik, yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan, dengan karakter pegunungan patahan (dikenal dengan Patahan Semangko) dan kompleks vulkanik dengan pusat erupsi umumnya di luar wilayah Provinsi Bengkulu.

d. Pulau Enggano mempunyai variasi morfologi dari dataran tinggi, dataran aluvial, dan perbukitan dengan ketinggian mencapai sekitar 284 m dari permukaan laut.

Sementara pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Enggano, dan juga 2 pulau kecil lainnya (Pulau Mega dan Pulau Tikus) cenderung merupakan dataran pantai saja dengan topografi yang datar dan sempit, dan berkarakter sebagai pulau karang.

e. Luas wilayah daratan Provinsi Bengkulu seluruhnya adalah 1.978.870 ha atau 19.788 km². Selaras dengan geomorfologi di atas, topografi wilayah dapat dirinci sebagai berikut :

- 0 - 100 m dpl : 708.133 ha (35,78 %)
- 100 - 500 m dpl : 625.399 ha (31,60 %)
- 500 - 1.000 m dpl : 406.044 ha (20,52 %)
- >1.000 m dpl : 239.294 ha (12,09 %)

f. Sementara rincian kemiringan wilayah yang hamper konsisten dengan topografi wilayah tersebut adalah :

- 0-15 % : 780.411 ha (39,44 %)
- 15-25 % : 319.023 ha (16,12 %)
- 25-40 % : 262.270 ha (13,25 %)
- >40 % : 617.256 ha (31,20 %)

2. Dari wilayah Provinsi Bengkulu seluas 1.978.870 ha, 37 % di antaranya merupakan kawasan hutan lindung (berdasarkan peta Padu Serasi antara RTRWP dan TGHK sesuai SK Gubernur Provinsi Bengkulu No.305/1998). Sebagian kawasan hutan lindung telah dirambah oleh masyarakat ataupun kayunya diambil oleh para penyandang dana dengan mempekerjakan masyarakat sekitar hutan. Kondisi hutan lindung saat ini yang merupakan wilayah berhutan mencapai 59,21 % dari luas hutan lindung di Provinsi Bengkulu, sehingga areal hutan lindung yang telah mengalami kerusakan mencapai 40,79 %.

Kondisi kehutanan di Provinsi Bengkulu per Desember 2004 untuk hutan konservasi, hutan lindung dan hutan budidaya mengalami degradasi yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan peruntukannya menurut Keputusan Menhutbun No. 240/ Kpts-11/1999 tanggal 15 Juni 1999 serta menurut keputusan Gubernur Bengkulu No. 305 tahun 1998 tanggal 14 Juli 1998. Luas wilayah hutan konservasi di Provinsi Bengkulu mencapai 444.397,8 ha atau 22,46 % dari luas Provinsi Bengkulu. Hutan konservasi ini meliputi hutan taman nasional, hutan suaka alam, hutan wisata alam dan hutan taman buru dan Tahura (Taman Hutan Raya). Kondisi hutan konservasi saat ini memprihatinkan karena lahan yang masih berhutan hanya 273.210,53 ha atau 61,48 %. Kerusakan hutan ini disebabkan karena masih adanya *illegal logging* dan perambahan liar. Padahal luas hutan konservasi yang ditetapkan menurut Keputusan Menhutbun dan Keputusan Gubernur tersebut diatas mencapai 22,48 % dari luas Provinsi Bengkulu.

Beberapa daerah dalam wilayah Provinsi Bengkulu didominasi oleh kawasan hutan konservasi dan hutan lindung sehingga areal yang tersedia untuk kegiatan budidaya dan permukiman menjadi sangat terbatas. Persentase luas kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Lebong. Hutan konservasi di Kabupaten Lebong yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) berbatasan

langsung dengan hutan lindung sebagai *buffer zone*. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan perhatian tersendiri terhadap daerah-daerah yang sebagian besar wilayahnya berada di kawasan hutan konservasi. Kebijakan yang diambil untuk pembangunan di daerah-daerah tersebut harus berlandaskan pada aspek konservasi.

3. Pengelolaan sumber daya alam masih belum bersifat berkelanjutan dan masih mengabaikan aspek-aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Pencemaran air, udara dan tanah masih belum teartangani secara tepat, karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah telah meningkatkan konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam baik antar wilayah, antar daerah serta antar pengguna. Peningkatan konflik ini disebabkan oleh *overlapping* kewenangan pengelolaan sumber daya alam. Untuk itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 20 atahun mendatang agar tidak mengalami krisis sumber daya alam khususnya krisis air, pangan dan energi.
4. Potensi pariwisata di Provinsi Bengkulu belum dikelola secara maksimal. Pariwisata laut dan perikanan di Provinsi Bengkulu dapat dikembangkan di pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil di Provinsi Bengkulu yang berpotensi dikembangkan menjadi daerah untuk wisata laut dan perikanan adalah gugusan kepulauan enggano dan kepulauan Mega.
5. Provinsi Bengkulu juga memiliki kekayaan tambang galian yang cukup beragam yang meliputi batubara, emas, pasir besi, batu gamping, batu apung, bentonit, lempung, zeolit/tras serta bahan galian golongan C seperti pasir dan batu.
6. Dalam wilayah Provinsi Bengkulu terdapat pertemuan dua lempeng/lapisan yang sewaktu-waktu dapat mengalami pergeseran sehingga berpotensi terjadinya gempa tektonik yang besar. Disampingn itu, pergeseran lempeng tersebut dapat mengakibatkan terjadinya gelombang Tsunami yang dapat melanda Pulau Enggano, Pulau Mega dan pesisir bagian barat Bengkulu. Gempa bumi yang tepatnya terjadi pada 4 Juni tahun 2000 lalu telah menghancurkan sebagian sarana dan prasarana fisik seperti gedung, sarana olahraga, jalan raya dan lain-lainnya sehingga pembangunan fisik yang dilaksanakan harus mengacu pada konsep pemabngunan yang tahan gempa.

II.2. TANTANGAN

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan proses pembangunan yang demikian tersebut, maka harus diketahui tantangan Provinsi Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. a. Dalam 20 tahun mendatang, Bengkulu akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu 2,94% per tahun akan menjadi tekanan besar pada tahun 2025. Apalagi diperkirakan parameter kependudukan akan mengalami perbaikan yaitu meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan peningkatan gizi masyarakat maka pertumbuhan penduduk akan semakin tinggi kalau diimbangi kualitas sumber daya manusianya maka akan menjadi kendala yang serius dalam pembangunan disegala bidang. Persaingan yang ketat di bidang ketenagakerjaan, serta perbedaan sebaran penduduk kota dan kabupaten juga akan terjadi pada tahun 2025. Oleh sebab itu, perbaikan indikator demografi dan kependudukan adalah tantangan pembangunan ke depan guna dimilikinya sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, baik dalam aspek ekonomi, penguasaan iptek dan pasar, maupun dalam kualitas kehidupan lainnya.
- b. Estimasi tingkat pertumbuhan penduduk didasarkan pada asumsi-asumsi tingkat kelahiran, tingkat kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Asumsi-asumsi yang dibangun untuk ketiga ukuran yang mendasari proyeksi laju pertumbuhan jumlah penduduk dalam 20 tahun ke depan terutama menggunakan kecenderungan yang terjadi pada masa lalu. Dalam hal ini, Provinsi Bengkulu memiliki kecenderungan tingkat kelahiran dan kematian yang menurun sedang migrasi netto positif.
- c. Tantangan dalam hal kependudukan tetap besar terutama masalah angkatan kerja, masalah dalam pemenuhan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan infrastruktur sosial yang semakin meningkat, serta masalah urbanisasi dan lingkungan.
2. a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Bengkulu yang diukur dengan tingkat gizi rendah, pendidikan rendah, kesenjangan pendidikan antara daerah kota dan kabupaten serta antara penduduk yang kaya dengan penduduk miskin menyebabkan daya saing tenaga kerja Bengkulu masih rendah. Dibidang kesehatan tuntutan tentang layanan kesehatan antar kota dan kabupaten serta antar tingkat sosial ekonomi akan semakin meningkat pada tahun 2025. Di bidang pendidikan, tuntutan tentang penyediaan layanan pendidikan berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antara penduduk perkotaan dan perdesaan. Tuntutan lain di bidang pendidikan adalah mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara kota dan kabupaten serta penduduk yang kaya dan miskin.

Data Angka Harapan Hidup (AHH) yang meningkat tidak dibarengi dengan pemerataan. Terjadinya perbedaan status kesehatan masyarakat secara fisik dan psikologis masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik juga masih rendah. Selain itu, perempuan cenderung lebih banyak mengalami beban psikologis dibandingkan dengan laki-laki. Korban kasus-kasus perkosaan dan penipuan banyak dialami

perempuan. Demikian pula, sebagian kaum miskin menanggung beban multi penyakit, yaitu masih banyak penderita penyakit infeksi menular, diantaranya TBC; dipihak lain mulai meningkatnya penyakit tidak menular; dan banyak pula anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Sebagian penderita gangguan jiwa tidak terurus dengan baik, khususnya anggota keluarga miskin, sehingga mereka dipasung atau dibiarkan berkeliaran di jalan-jalan. Dilihat dari penderita gangguan jiwa pada 2002; rawat jalan 4.678 orang dan kunjungan Unit Gawat Darurat (UGD) 368 orang; pada tahun 2003 terdapat rawat jalan 6.223 orang dan kunjungan UGD 536 orang; dan pada tahun 2004 penderita rawat inap sebanyak 442 orang. Permasalahan yang dialami di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) diantaranya adalah banyak keluarga pasien yang tidak mau bekerjasama dengan RS yaitu banyak keluarga menolak bila pasien dipulangkan dan menganggap bahwa RSJ adalah tempat penitipan. Selain itu, RSJ seringkali kekurangan bahan habis pakai, kekurangan tenaga di antaranya instruktur terapi okupasi, autisme dan gangguan pusat perhatian, kesenian, motorik kasar dan halus. Demikian pula tenaga psikiater dan tenaga medis lain masih kurang, akhirnya kegiatan ETC (*Elektromedik*) belum berjalan seperti yang diharapkan karena kurang operator dan madya anestesia *Hot Lines Services* (HLS) saluran telepon khusus belum juga tersedia, serta cakupan radiologi masih sangat rendah.

- b. Perhatian pemerintah terhadap kesehatan penduduk cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Selain adanya layanan gratis terhadap pemberantasan penyakit menular sejak lebih dari dua puluh tahun yang lalu, persentase keluarga miskin sejak tahun 2003 telah mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) adalah 5% dari jumlah penduduk miskin, meningkat pada tahun 2004 menjadi 10% dan tahun 2005 telah terlayani 15%. Pada tahun 2006-2010 ditargetkan menjadi 40%, dan diharapkan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Berkat peningkatan kuantitas, kualitas, dan pemerataan program layanan kesehatan tersebut, status kesehatan masyarakat terus meningkat. Diantaranya adalah angka penderita TBC yang dapat disembuhkan meningkat dari 55% pada Tahun 2001 menjadi 85% pada tahun 2006 serta seterusnya penderita TBC ditargetkan dapat disembuhkan lebih dari 85%.
- c. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta ketersediaan pembiayaan kesehatan masih rendah, berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kesehatan pembiayaan kesehatan masih rendah, berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Indikator lingkungan sehat adalah jumlah keluarga yang menghuni rumah sehat, menggunakan air bersih, dan menggunakan jamban milik sendiri. Pada tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004 masing-masing telah berhasil dibina 30%, 35%, 45%, dan 50% keluarga. Berkat pembinaan tersebut pada tahun 2004 persentase penduduk yang telah menggunakan air bersih adalah 33,16%, telah memiliki jamban sendiri sebanyak 71,25% dan yang rumahnya masih berlantai tanah hanya sebesar 10,14%. Pembinaan lingkungan sehat ini diharapkan juga menciptakan perilaku masyarakat untuk hidup sehat tidak saja di dalam keluarga tetapi juga di kantor-kantor, hotel, pasar, salon kecantikan, sarana ibadah, sekolah dan sebagainya.

- d. Prevalensi akseptor KB terhadap pasangan usia subur (PUS) pada tahun 2001 sampai 2005 meningkat dari 48% menjadi 56%, ditargetkan menjadi 58% pada tahun 2006, 66% pada tahun 2010, dan terus meningkat pada tahun berikutnya. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah per kapita pada tahun 2001 Rp.10.000,- meningkat menjadi Rp. 50.000,- pada tahun 2005, tahun 2006 ditargetkan menjadi Rp. 60.000,- dan Rp. 100.000,- pada tahun 2010.
 - e. Rendahnya status gizi bayi merupakan ancaman bagi tumbuh kembang anak, termasuk kecerdasannya. Berbagai ancaman lain yang perlu diwaspadai di bidang kesehatan diantaranya adalah munculnya jenis kuman baru, termasuk HIV yang belum ada obatnya, flu burung; serta ancaman terjadinya gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu perlu dirancang layanan kesehatan dan pencegahan bencana/tanggap darurat, termasuk tenaga medisnya perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, serta perlu dibangun laboratorium kesehatan dan peralatan yang lebih canggih, ditubjang tenaga profesional guna mendeteksi berbagai kuman dan penyakit, melakukan program preventif, sekaligus kuratifnya dengan baik.
 - f. Ancaman yang cukup berat lainnya adalah naiknya BBM pada tahun 2005 sebesar 90%, yang diikuti dengan melonjaknya harga semua kebutuhan pokok, sementara penghasilan penduduk tidak bertambah, yang menyebabkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan dasar semakin rendah. Dalam kondisi itu jumlah penduduk miskin semakin banyak. Meskipun rakyat miskin mendapatkan subsidi per bulan sebesar Rp. 100.000,- jumlah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan paling dasar. Oleh karena itu, yang perlu diwaspadai adalah kenaikan BBM tersebut akan berlanjut di masa mendatang, sampai ada kesesuaian dengan harga BBM di pasar dunia dan jika tidak ada lompatan usaha dan menghasilkan kemajuan signifikan, dikhawatirkan jumlah penduduk miskin akan bertambah, mengakibatkan tingkat kesehatan penduduk menurun, dan hal ini mengancam upaya peningkatan kualitas SDM.
3. a. Banyaknya anak usia pendidikan dasar (7-15 tahun) tidak mengikuti pendidikan SD/Mi dan SMP/MTs disebabkan oleh kondisi faktual di kabupaten-kabupaten dalam wilayah Provinsi Bengkulu masih termasuk daerah tertinggal. Kategori daerah tertinggal tersebut berdasarkan 6 indikator utama, yaitu (1) perekonomian masyarakat, (2) sumber daya manusia, (3) sarana dan prasarana (infrastruktur), (4) kemampuan keuangan lokal, (5) karakteristik daerah, dan (6) aksesibilitas. Berdasarkan indikator tersebut, delapan kabupaten di Provinsi Bengkulu, semuanya termasuk daerah tertinggal. Hanya Kota Bengkulu yang tidak termasuk daerah tertinggal.
 - b. Kualitas lulusan pendidikan formal dari tingkat pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi amat memprihatinkan, diantaranya pada tingkat SMP dan yang sederajat serta SMA yang sederajat, ditunjukkan oleh hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) Tahap II 2004/2005 rata-rata siswa SMP/MTs menduduki peringkat ke-29 dari 32 wilayah di Indonesia. Sedangkan rata-rata siswa SMU pada bidang IPA menduduki peringkat ke-24, IPS peringkat ke-27, dan Bahasa Indonesia peringkat ke-26, dengan batas standar kompetensi minimal 4,26. Itu berarti, amat jauh dari standar kompetensi lulusan nasional yaitu 7,5 dan jauh dari tujuan pendidikan nasional yaitu: "... mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa, serta berkembangnya potensi generasi muda agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

- c. Apabila kualitas lulusan, khususnya hasil Ujian Nasional siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sebagaimana digambarkan di atas dijadikan salah satu indikator rendahnya kualitas proses pembelajaran, maka dapat juga diduga merupakan salah satu indikator masih relatif rendahnya kompetensi guru. Keadaan ini berarti juga merupakan salah satu cermin dan realatif rendahnya kualitas lulusan Perguruan Tinggi di Bengkulu. Perguruan tinggi yang diantaranya menghasilkan lulusan untuk menjadi guru yang professional belum dapat memenuhi target kualitas. Selain itu, perguruan tinggi di Bengkulu juga belum memiliki program unggulan yang menarik calon mahasiswa yang memiliki potensi tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Banyak putera daerah yang memiliki potensi tinggi dan mampu secara ekonomis justru melanjutkan ke perguruan tinggi di luar Bengkulu, yaitu pada program yang lebih unggul dan berkualitas, serta menjanjikan pekerjaan yang mapan.
- d. Permasalahan lain yaitu sarana dan prasarana yang memiliki perguruan tinggi di Bengkulu masih tertinggal dibandingkan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang maju seperti di Pulau Jawa. Selain itu, itu faktor rendahnya mutu manajemen dapat menjadi salah satu penyebab lembaga-lembaga tersebut menjadi tidak dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pribadi, sosial dan professional yang memadai, serta tidak memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, perlu upaya lebih besar dalam peningkatan kompetensi profesional para pengelola pendidikan.
- e. Para pimpinan lembaga pendidikan harus transparan kepada masyarakat dalam merancang dan mengevaluasi proses dan hasil pendidikan, termasuk transparan dalam keuangannya, sebagaimana amanat UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003 Bab IV Pasal 8: : "Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan". Namun, masyarakat juga berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 UU RI Nomor 20 Tahun 2003.
- f. Rendahnya kualitas kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi, diantaranya ditunjukkan dengan rendahnya hasil Ujian Nasional siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, jika dikaitkan dengan IQ (Intelegensia Quotion) siswa di Bengkulu ternyata sama dengan IQ siswa siswa di daerah-daerah lain di Indonesia sebagaimana tergambar dalam kurve normal. Ini berarti potensi siswa di Bengkulu belum teraktualisasi dan merupakan akibat dari proses pengelolaan lembaga dan proses pembelajaran kurang professional.
- g. Pada jenjang sekolah dasar di daerah perdesaan, terpencil, terisolir, dan transmigrasi masih kekurangan guru, dan masih ada sekolah-sekolah dasar hanya memiliki satu guru. Selain itu, berbagai penataran dan pelatihan guru terus berlangsung dampaknya belum terlihat secara nyata. Karena itu, perlu pengkajian

mendalam tentang faktor-faktor yang mendasari rendahnya kualitas kompetensi siswa tersebut, perlu evaluasi terhadap kualitas kompetensi hasil *pre service training* dan *inservice training* para pendidik, perlu menggalakan supervisi pendidikan secara lebih intensif, melakukan diagnosis pembelajaran dan hasil belajar guna memperoleh dasar untuk menyusun program remedial bagi para guru maupun siswa, demi terwujudnya kualitas hasil kompetensi belajar yang memadai.

- h. Sistem imbal jasa dan jauhnya sekolah bagi pengawas belum mendorong mereka untuk melakukan supervisi secara teratur, ditambah kompetensi professional supervisor kurang memadai; sistem *reward dan punishment* belum diterapkan secara tegas dan lugas kepada pelaksana pendidikan dan pada hampir semua kesempatan, menyebabkan masalah di bidang pendidikan hampr tidak teratasi.
- i. Orientasi hasil belajar berdasar kompetensi masih dalam tahap wacana. Indikator kompetensi siswa dalam hal ilmu sosial, misalnya nilai agama seorang siswa 80, masih belum dapat menjamin siswa menunjukkan perilaku takut kepada Tuhan, jujur, empati, dan senana beramal. Oleh karena itu, diperlukan proses pembelajaran yang dapat memfasilitasi tumbuh kembang sikap dan perilaku anak sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan, serta ada jalinan kerjasama harmonis dengan orangtua siswa. Sebagian orang tua masih kurang sadar bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua. Selain itu perlu dikembangkan sistem evaluasi *portofolio* yang mampu menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa baik disekolah maupun di rumah yang dilandasi kejujuran dari semua pihak yang terlibat; yaitu kepala sekolah, guru, dan orang tua murid dan dilandasi sikap sportif serta bertanggung jawab agar dapat menjadi model bagi sikap dan perilaku siswa.
- j. Jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas yang mengalami buta aksara masih cukup besar, yakni 56.102 orang terdiri dari 23.314 orang usia 7-44 tahun dan 32.789 orang usia 45 tahun ke atas. Pemerintah menargetkan pada tahun 2015 bebas buta aksara, sedangkan Bengkulu memproyeksikan tahun 2008 bebas buta aksara. Keadaan ini mengharuskan pemerintah meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan memadai, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.
- k. Kecerdasan spiritual, sosial (*Social Quotions/SocQ*), dan emosional anggota masyarakat, pejabat pemerintah dan stafnya di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, termasuk pelaku pendidikan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari gejala kecenderungan masyarakat egois, individual, dan banyaknya pengelolaan dana pemerintah yang tidak transparan, kurang efisien dan kurang efektif, serta adanya indikasi KKN, *mark-up*, dan manipulasi. Kecerdasan emosional (EQ) anggota masyarakat juga masih rendah dapat dilihat dari sikap memaksakan kehendak dalam pemecahan masalah hingga berakhir dengan perkelahian, perusakan, bahkan pembunuhan. Sedangkan indikator kecerdasan spiritual (SQ) para pemangku kekuasaan dan masyarakat masih rendah dapat dilihat dari angka kejahatan baik kejahatan fisik maupun korupsi masih jauh dari harapan untuk mewujudkan anggota masyarakat berbudaya agar diperhitungkan di tingkat nasional maupun internasional. Tingkat kejahatan meningkat tajam dari tahun 2000 sebanyak 1.322 kasus dan pada tahun 2004 menjadi 1.754 kasus. Dengan

pengangguran pada laki-laki. Perempuan juga masih mengalami berbagai bentuk praktek diskriminasi dalam hal partisipasi kerja, sistem promosi dan penggajian. Sebagian besar perempuan masih mengalami tindak kekerasan, kurang mendapatkan akses yang baik dalam layanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, dalam hal berusaha, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

5. a. Kualitas pemuda di Provinsi Bengkulu ini masih rendah. Sebagian para pemuda kurang memiliki keterampilan hidup fungsional. Mereka juga kurang memiliki sikap mental Wira Usaha, serta rendahnya minat pemuda untuk tinggal di desa. Oleh karena itu, perlu ada upaya menempatkan dana KUPP (Kelompok Usaha Pemuda Produktif) yang berorientasi sumber daya alam lokal dan dana *Life Skills* Lembaga Kepemudaan serta *Life Skills* SP-3, selain itu, kurang kuat landasan keimanan dan nilai moral, adanya globalisasi informasi telah banyak menjerumuskan sebagian pemuda pada tindak kejahatan. Hal ini dapat diamati dari maraknya pornografi dan pornoaksi, banyaknya pemuda yang menjadi pemakai dan pengedar napza, minum-minuman keras, judi, terlibat dalam pemakai dan pengedar napza, cenderung materialistis dan hedonis, serta tak segan-segan berbuat kejahatan atau membuat keributan.
- b. Kurangnya sarana, berpengaruh pada rendahnya motivasi penduduk yang status sosialnya rendah, selain mereka cenderung menggunakan waktunya untuk mencari uang, mereka juga tidak bias mengeluarkan dana untuk membeli alat yang dibutuhkan untuk produksi. Faktor lain adalah akibat kurang terkoordinasi lembaga-lembaga yang mengembangkan olahraga dan kurangnya dana dalam pengembangan. serta insentif di bidang olahraga masih sangat rendah sehingga individu yang memiliki bakat olahraga tidak memperdalamnya karena ia yakin tidak dapat menjamin masa depannya. Selain itu, rendahnya motivasi olahraga adalah karena tidak ada pembinaan bakat olahraga sejak masih kanak-kanak, sehingga bakat olahraga tidak dapat berkembang secara optimal. Sebagian anggota masyarakat kurang menyadari pentingnya olahraga sebagai landasan untuk menjaga kualitas kesehatan. Di Provinsi Bengkulu perlu dikembangkan lembaga yang memberikan layanan olahraga secara profesional yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.
- c. Tantangan lainnya adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang makin kompleks dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial seperti kecenderungan menurunnya nilai budaya dan agama serta terjadinya bencana alam. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan Bengkulu untuk mempertahankan jati diri sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing. Rendahnya pendidikan, keterampilan, dan keimanan para pemuda maka pemerintah berupaya menempatkan dana KUPP (Kelompok Usaha Pemuda Produktif) yang berorientasi sumber daya alam lokal dan dana *Life Skills* Lembaga Kepemudaan serta *Life Skills* SP-3, selain itu, bagi KPS (Kelompok Pemuda Sebaya) dari kalangan pelajar dan pemuda perlunya pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada para pemuda, pembinaan reproduksi sehat, pencegahan terhadap

minuman keras, napza, judi dan pencegahan merokok. Dalam hal pembinaan terhadap seni dan olahraga: pertukaran pemuda antar-provinsi, KUPP (Kelompok Usaha Pemuda Produktif) agar mandiri dan berkarya sesuai dengan bakat dan kemampuannya, pembinaan manajemen dan usaha dengan berbagai kegiatan: menjahit, komputer, meubeler dan industri kecil lainnya yang berupa makanan, kesehatan, bahasa, tehnik, jasa, pertanian dan peternakan, aritmatika/sempro, bimbingan belajar dan sebagainya.

6. a. Indikator lainnya kualitas SDM adalah moral yang sehat dapat ditumbuhkembangkan melalui pendidikan agama, secara kuantitas bagi seluruh anak didik telah mendapat pendidikan agama. Hal itu merupakan peluang bagi tumbuh kembang SQ. tantangannya adalah: "Bagaimana proses pembelajaran agama dapat mewujudkan individu-individu yang beriman?". Dalam kenyataannya, anak didik kurang mendapatkan model yang patut di contoh. Situasi kondisi di masyarakat juga kurang kondusif bagi proses pembelajaran agama. Banyaknya kejahatan yang tidak diproses secara adil, banyaknya kebohongan yang dapat dilihat secara nyata oleh anak didik, tidak dapat memberikan penguatan moral bagi anak didik. Akibatnya generasi muda tumbuh menjadi individu yang cenderung mengejar kekenakan dan menghindari ketidakenakan.
- b. Kualitas keimanan sebagian penyelenggara Negara dan masyarakat masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyak kasus korupsi, *mark up*, kolusi, perilaku pencurian dengan pemberatan dan kekerasan, pemakaian dan perdagangan narkoba, pembunuhan dan tindak kejahatan lainnya yang masuk ke pengadilan disertai dengan ketidakadilan dalam hal penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya untuk berani menindak kejahatan agar rakyat merasa nyaman dan tenteram perlu lebih digalakkan, agar tumbuh kepercayaan dan kesejahteraan rakyat secara perlahan-lahan tetapi pasti. Jika tidak, sebagian rakyat menjadi apatis, daya juang serta motivasi kerja luntur. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan ancaman berupa konflik antar individu atau antar kelompok, dan kerawanan sosial.
- c. Pendidikan agama yang lebih intensif perlu diberikan kepada anak dari sejak usia dini dan berlanjut hingga ke pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Bahkan pendidikan agama perlu diberikan kepada penyelenggara negara agar takut kepada Tuhan jika bertindak melanggar aturan-aturannya. Pemeluk agama islam lebih dari 80% penduduk sebagian besar diajarkan agama dengan proses kurang tepat dan jumlah jam belajar di sekolah kurang, sementara banyak orang tua tidak menyadari bahwa pendidikan agama penting. Dengan proses pembelajaran agama yang tepat dan jumlah jam belajar cukup, didukung oleh orang tua, masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat, serta disediakan sarana dan prasarana belajar yang cukup, dengan harapan secara berangsur-angsur dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak didik dan masyarakat luas. Jika proses pembelajaran agama tidak segera diperbaiki, generasi muda akan tumbuh menjadi individu berpribadi egois, materialistis, dan hedonis.
- d. Tantangan ke depan dalam bidang budaya yang harus disikapi dan menjadi perhatian pembangunan adalah semakin mudarnya nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air sebagai akibat dari

kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya penegakan hukum, dan masuknya budaya global negatif serta akibat kondisi sosial ekonomi masyarakat.

B. EKONOMI

- 1 a. Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita-citanya untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Persaingan ekonomi secara global baik regional, nasional maupun internasional akan terjadi pada tahun 2025. Oleh karena itu, tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju. Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 – 2004 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 5,35%, meningkat 1,12% dibandingkan dengan tahun 2003 (4,23%). Peningkatan kegiatan ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti sebelum krisis. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah investasi, diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah. Lemahnya daya saing tersebut, disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM, rendahnya penguasaan teknologi dan penerapan dalam proses produksi, juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi.
- b. Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah. Dua faktor utama yang menyebabkan rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi, transportasi dan komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran). Rendahnya Produktivitas sektor pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di perdesaan. Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan. Oleh karena itu, ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bias dikurangi dan beralih ke ekspor barang jadi. Oleh karena itu, pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di sektor pertanian.

- c. Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB sebesar 42,02% tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 70,59%. Sektor pertanian di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Pada tahun 2003, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 42,02% terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku. Kontribusi tersebut jauh meningkat dibandingkan pada tahun 2000, 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah angka 41%.
- d. Meskipun kontribusi sektor pertanian tetap mendominasi PDRB Provinsi Bengkulu, serapan tenaga kerja di subsektor pertanian primer selama 20 tahun ke depan perlu diturunkan. Seiring dengan proses industrialisasi maka sebagian tenaga kerja manusia di sektor pertanian dapat diganti dengan mesin melalui program mekanisme pertanian. Dengan demikian, produktivitas di sektor pertanian khususnya subsektor pertanian primer diharapkan meningkat pada kurun waktu 20 tahun ke depan. Sisa tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 42,74% harus disalurkan pada subsektor pertanian sekunder (industri pengolahan hasil pertanian), subsektor pertanian tersier (pemasaran produk pertanian), dan sektor-sektor lain di luar pertanian seperti industri dan jasa.
- e. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap. Tantangan yang dihadapi antara lain yaitu kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat seperti hak sosial budaya, ekonomi dan politik.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Era globalisasi merupakan suatu keadaan yang tidak mengenal batas antar wilayah atau Negara. Untuk menguasai era globalisasi tersebut, maka pemahaman atau penguasaan IPTEK harus ditingkatkan.
2. Sumber Daya manusia yang bergerak di bidang IPTEK kuantitas dan kualitasnya perlu ditingkatkan.
3. Produk primer dunia usaha ternyata mempunyai nilai ekonomi yang rendah dibandingkan produk hilirnya. Untuk itu, penguasaan IPTEK di bidang hilir yakni pengolahan produk primer menjadi produk sekunder, tersier atau jasa perlu dioptimalkan.
4. Degradasi lingkungan merupakan residu dari suatu usaha produksi, untuk itu teknologi ramah lingkungan perlu diaplikasikan dalam usaha pembangunan.

D. Sarana dan Prasarana

1. Tantangan dalam bidang sarana dan prasarana transportasi adalah mengatasi berbagai permasalahan, yakni : Jalan arteri (jalan utama), jalan lingkungan dan arteri sekunder banyak yang rusak, lebar badan jalan rata-rata tidak sama, kapasitas badan jalan semakin terbatas, terutama di daerah perdesaan. Pembangunan jaringan jalan kereta api memerlukan dana cukup besar. Sedangkan prasarana dan sarana

transportasi laut di Provinsi Bengkulu masih terdapat sedikitnya aktivitas bongkar muat barang dan pelabuhan di pelabuhan, tingginya biaya pajak yang dipungut oleh pihak pelabuhan, belum tersedianya fasilitas prasarana dan sarana yang memadai, dan masih kurangnya peran swasta dalam pembangunan pelabuhan. Pada bidang transportasi udara, adalah rute penerbangan pesawat dan frekuensi penerbangan pesawat setiap hari masih sedikit, biaya penerbangan masih mahal dan kapasitas bandara masih kecil, yakni dapat melayani jenis pesawat tertentu saja.

2. Di bidang pembangunan sarana pengairan irigasi, permasalahan yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan akan air, jaringan yang lama rata-rata sudah banyak tidak berfungsi (rusak) dan sistem pengaturan air tidak berjalan. Di bidang energi listrik, permasalahan yang muncul adalah keterbatasan kapasitas pembangkit, yakni kapasitas tenaga listrik yang tersedia tidak mampu melayani permintaan listrik, sebagian besar pelayanan hanya terdapat di daerah perkotaan, tingginya ketergantungan terhadap BBM, dan keterbatasan kemampuan pendanaan. Keterbatasan infrastruktur informasi, tidak meratanya penyebaran infrastruktur informasi masih merupakan tantangan utama pada bidang infrastruktur telekomunikasi.
3. Pada bidang permukiman menghadapi keterbatasan kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan, masih banyaknya penduduk perkotaan dan perdesaan belum memiliki tempat tinggal, belum tertatanya system perumahan dan lingkungan, terutama di daerah permukiman nelayan, daerah pelabuhan dan daerah permukiman sekitar pasar, dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membangun rumah layak huni. Sedangkan permasalahan pada bidang penyediaan air bersih, adalah masih sedikitnya jumlah pelanggan yang menggunakan air PDAM, rendahnya kualitas pengelolaan air minum yang dikeluarkan oleh PDAM, tingginya tingkat kebocoran yang terjadi pada perpipaan, permasalahan tariff yang tidak mampu mencapai kondisi pemulihan biaya, dan meningkatnya kecenderungan kabupaten-kabupaten baru untuk membentuk PDAM baru yang terpisah dari kabupaten induk.

E. Politik dan Keamanan

Tantangan dalam bidang politik adalah urgensi pemekaran wilayah, Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) secara langsung, harmonisasi hubungan kewenangan antar kepala daerah. Kemudian tantangandibidang keamanan adalah kerusakan hutan, narkoba di kalangan anak muda, dan kriminalitas.

Peraturan perundang-undangan memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah, salah satu dampak dari bergulirnya reformasi di daerah untuk melakukan pemekaran wilayah, salah satu dampak dari bergulirnya reformasi di daerah. Oleh karena pemekaran wilayah dianggap sebagai solusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi rakyat. Kemudian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dalam aplikasinya akan melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini akan memberikan peluang terjadinya benturan kepentingan yang akan berakibat pada kerusuhan, demonstrasi dan menciptakan kondisi yang tidak kondusif. Pada tataran selanjutnya, belum terciptanya harmonisasi kewenangan kepala daerah Provinsi, kabupaten dan kota,

sehingga kebijakan dalam pembangunan secara terpadu dan berkesinambungan menjadi kecil. Kurang sinerginya program-program pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten dan kota. Maraknya praktik pembalakan liar (*illegal logging*) dengan alasan pembangunan menjadi tantangan dibidang keamanan yang tidak kalah penting, akibatnya akan menambah potensi kerusakan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu. Keamanan juga didorong oleh peran generasi yang sehat dan kuat, salah satunya adalah generasi muda yang bebas narkoba dan mampu membentengi dengan nilai-nilai religius.

F. Hukum dan pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan ini makin meningkat kompleksitasnya dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Partisipasi masyarakat menjadi tema dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparat daerah tidak adapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparat daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi ini perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik.

Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan daerah. Revolusi teknologi dan informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemanfaatan TI dalam bentuk *e-government*, *e-procurement*, *e-business* dan *cyber law* selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

G. Wilayah dan Tata Ruang

1. Dalam konteks tata ruang nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997), ada 5 poin yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan wilayah dan pemanfaatan ruang di Provinsi Bengkulu. Kelima aspek tersebut adalah kawasan lindung dan kawasan budidaya (didaratan), kawasan laut, kawasan andalan, fungsi kota dan simpul permukiman perkotaan, dan jaringan prasarana transportasi. Tiga aspek pertama, merupakan bagian dari Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, sedangkan dua aspek berikutnya merupakan bagian dari Struktur Ruang Wilayah Nasional.
2. Kawasan lindung yang dimaksud dalam RTRWN terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam di darat. Kawasan lindung yang terdapat di wilayah Provinsi Bengkulu merupakan bagian yang menerus dengan kawasan lindung yang terdapat di wilayah tetangganya (Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung). Kawasan

budidaya pada prinsipnya merupakan kawasan yang berada di luar kawasan lindung tanpa dirinci menurut fungsi-fungsinya, sehingga sering juga disebut areal peruntukan lain (AL).

Kawasan laut yang terdapat dalam wilayah Provinsi Bengkulu mencakup perairan laut Provinsi Bengkulu yang merupakan bagian dari perairan Samudera Hindia. Sektor unggulan untuk kawasan laut Bengkulu sekitarnya adalah perikanan dan pariwisata. Sementara kawasan andalan yang merupakan kawasan daratan di Provinsi Bengkulu terdiri dari Kawasan Bengkulu dan sekitarnya, dengan sektor unggulan pertanian tanaman pangan, industri, perikanan dan perkebunan, serta Kawasan Manna dan sekitarnya, dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian tanaman pangan dan industri. Kawasan pertama mencakup wilayah Provinsi Bengkulu bagian Utara, sedangkan kawasan kedua meliputi wilayah Provinsi Bengkulu bagian Selatan.

Sehubungan dengan penetapan kawasan andalan di atas, telah ditetapkan fungsi-fungsi kota atau simpul permukiman perkotaan di masing-masing kawasan andalan tersebut. Di kawasan Bengkulu sekitarnya, kota Bengkulu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sedangkan Curup, Argamakmur dan Kepahiang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan di kawasan Manna dan sekitarnya terdapat dua PKI, yakni Manna dan Bintuhan. Dengan demikian, wilayah Provinsi Bengkulu tidak memiliki Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan hanya memiliki satu PKW, yaitu Kota Bengkulu, dan 5 PKL.

Jaringan prasarana transportasi yang ditetapkan untuk wilayah Provinsi Bengkulu meliputi jaringan jalan raya, pelabuhan laut dan Bandar udara. Jaringan jalan raya yang melintasi atau terdapat di wilayah Provinsi Bengkulu terdiri atas 2 jaringan jalan arteri primer dan 3 jaringan jalan protokol primer. Jalan arteri primer terdiri dari jalur (kruai)-Bintuhan-Manna-Bengkulu-Mukomuko (Padang) yang disebut Jalan Lintas Barat, dan jalur Bengkulu-Kepahiang-Curup-(Lubuk Linggau) yang merupakan feeder road menuju Jalan Lintas Sumatera. Sementara jalan kolektor primer terdiri dari jaringan Manna-(Pagar Alam-Lahat), jaringan Kepahiang-(Pagar Alam-Lahat), dan jaringan Kepahiang-(Pagar Alam-Lahat), dan jaringan Bintuhan-(Pulau Beringin-Muara Dua-Martapura). Pelabuhan laut yang ditetapkan untuk wilayah Provinsi Bengkulu ada 3 pelabuhan, yakni Bengkulu sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional, Bintuhan dan Enggano yang masing-masing sebagai Pengumpan Lokal. Sementara untuk bandara udara maka telah ditetapkan Bengkulu sebagai Pusat penyebaran Tersier.

Dalam konteks Tata Ruang wilayah Pulau Sumatera, kebijaksanaan dasar RTRW Pulau Sumatera yang relevan dengan Provinsi Bengkulu meliputi 10 aspek sebagai berikut :

- 1) Menghindari konflik perbatasan antar wilayah, antar provinsi maupun antar kabupaten/kota;
- 2) Memantapkan interaksi kawasan pantai timur dan pantai barat melalui sistem jaringan transportasi yang handal;

- 3) Mengembangkan komoditas unggulan wilayah yang handal melalui kerjasama pengelolaan dan pemasaran melalui konsep regional *management*;
 - 4) Mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata dan migas ke pusat industri pengolahan.
 - 5) Mempertahankan kawasan lindung sebesar 40% dari luas Pulau Sumatera dan memperoleh manfaat dari pelestarian kawasan lindung tersebut;
 - 6) Memperkuat pusat-pusat di pantai timur yang dapat dimanfaatkan menjadi pasar regional dan internasional;
 - 7) Mendorong kemandirian akses ke pasar global dengan mengurangi ketergantungan pada Singapura;
 - 8) Mengembangkan komoditas berdaya saing global yang didukung oleh industri pengolahan bertaraf internasional;
 - 9) Mengembangkan sistem transportasi yang menghubungkan kota-kota pusat kegiatan di wilayah sumatera dengan pusat-pusat kawasan bisnis di Asia-Afrika
 - 10) Mempertahankan keunikan budaya lokal
3. Khusus mengenai tantangan batas wilayah, maka upaya menghindari konflik perbatasan antar provinsi maupun antar kabupaten/kota perlu menjadi perhatian utama.

H. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Perawatan hutan terutama kawasan hutan lindung di hulu sungai di daerah Provinsi Bengkulu perlu dilakukan secara baik, sehingga konservasi air bagi kawasan hilir dapat terjamin.
2. Proyeksi ancaman ke depan adalah adanya pembukaan lahan baru untuk pertanian dan perkebunan oleh masyarakat yang disebabkan karena terbatasnya lahan yang tersedia. Proyeksi tingkat keberhasilan untuk mempertahankan luas hutan konservasi menurut Keputusan Menhutbun No. 240/Kpts-11/1999 tanggal 15 Juni 1999 serta menurut Keputusan Gubernur Bengkulu No. 305 tahun 1998 tanggal 14 Juli 1998 relatif rendah. Kemungkinan keberhasilan dapat ditingkatkan apabila masyarakat sekitar hutan mendapatkan kompensasi daeri partisipasi mereka dalam melestarikan lingkungannya.
3. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan industrialisasi, pertanian dan perkebunan dapat member sumbangan pencemaran terhadap sungai, tanah, dan air sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan system lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan yaitu adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia.

4. Potensi pariwisata dan perikanan serta sumber daya alam lainnya masih belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Berdasarkan data yang direkam melalui satelit tahun 2000, luas hutan Mangrove di Pulau Enggano adalah 1.414,8 ha, yang tersebar di bagian barat dan timur, dengan kondisi yang masih baik. Namun, kondisi sebagian terumbu karang di sekitar Pulau Enggano tersebut sudah mulai memprihatinkan. Hal itu akibat dari penggunaan bahan peledak oleh para nelayan ketika menangkap ikan. Selain itu, kerusakan terumbu karang juga diakibatkan oleh aktivitas penambangan terumbu karang yang cukup tinggi untuk bahan bangunan dan pengerasan jalan. Berdasarkan fakta tersebut, maka tantangan pembangunan di kawasan pesisir adalah konservasi kawasan.
5. Lemahnya data merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan potensi bidang pertambangan, terutama belum akuratnya pendataan dan analisis potensinya serta lokasinya sebagian besar berada di hutan lindung.
6. Provinsi Bengkulu merupakan daerah rawan gempa, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Gempa tektonik yang besar dapat diikuti gelombang tsunami, dapat mengakibatkan kerusakan luar biasa, baik kerusakan SDM, SDA, maupun infrastruktur yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Tantangannya adalah bagaimana melestarikan wilayah hutan Mangrove dan wilayah sepadan pantai agar dapat meredam gelombang tsunami apabila terjadi sewaktu-waktu. Di samping itu, pembangunan infrastruktur perlu menggunakan struktur bangunan tahan gempa.

II. 3 MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang memiliki dan didayagunakan masyarakat Bengkulu dalam pembangunan daerah.

1. Provinsi Bengkulu terletak di antara 2 16'-5 31' Lintang Selatan dan 101 00'-103 50' Bujur Timur (berdasarkan Peta Rupa Bumi BAKOSORTANAL skala 1:250.000). wilayah ini berada di bagian Barat Sumatera Bagian Selatan dengan ketinggian 0-1.200 m dari permukaan laut. Fisiografi wilayah Provinsi Bengkulu di Pulau Sumatera (*mainland*) terdiri dari jalur daratan rendah yang tidak begitu lebar dan membentang dari ujung utara dari Pegunungan Bukit Barisan. Wilayah Provinsi Bengkulu yang seperti disebut di atas, sangat penting disadari karena merupakan kekuatan sekaligus kelemahan dan memberikan peluang serta ancaman yang menjadi basis bagi kebijakan pembangunan daerah di berbagai bidang, baik di bidang social dan budaya, ekonomi wilayah, lingkungan hidup, pertahanan keamanan, maupun hukum dan aparatur Negara.
2. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat, laut, udara dan dirgantara terbatas jumlahnya sehingga pendayagunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat.
3. Keragaman budaya penduduk merupakan potensi bagi pembangunan daerah.

4. Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

III.1 Visi

Berdasarkan kondisi umum, tantangan, modal dasar pembangunan daerah Provinsi Bengkulu, yang telah diuraikan pada Bab II menggambarkan bahwa masyarakat Provinsi Bengkulu belum sejahtera, Sumber Daya manusia masih kurang unggul, infrastruktur pembangunan belum memadai dan merata, demokrasi baru mulai tumbuh, dan layanan publik oleh aparat pemerintah belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka arah pembangunan daerah Provinsi Bengkulu mempunyai tujuan untuk memenuhi masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan memperkokoh perekonomian.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka arah pembangunan daerah Provinsi Bengkulu mempunyai tujuan untuk memenuhi masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan memperkokoh perekonomian.

Atas dasar kondisi ideal yang diinginkan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025 adalah :

**“Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan demokrasi bertumpu
Pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa
Serta perekonomian kokoh”**

Visi pembangunan Provinsi Bengkulu tersebut mengarah pada pencapaian pembangunan nasional, seperti tertuang pada visi pembangunan nasional tahun 2005-2025, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Masyarakat sejahtera, yaitu masyarakat yang aman sentosa dan makmur serta terlepas dari segala macam kesukaran.

Masyarakat adil dan demokratis, yaitu rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, perlindungan dan eksamaan di depan hukum, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender dan daerah.

Sumber daya manusia unggul dan bertaqwa, memiliki cirri-ciri: beriman yaitu memahami pengertian dasar tentang agama yang dianut dan mengamalkannya, cerdas, kreatif, memiliki tingkat pendidikan yang cukup untuk mengadopsi dan menginovasi teknologi, serta sehat jasmani dan rohani.

Perekonomian yang kokoh, dicirikan oleh adanya daya saing yang tinggi, serta terjadinya transformasi struktur ekonomi dari sektor primer, seperti pertanian dan pertambangan ke sektor sekunder yang meliputi sektor industri berbasis pertanian dan ditunjang oleh sektor tersier berupa jasa, ekuangan, perdagangan dan transportasi.

III.2 MISI

Untuk mewujudkan visi Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025, maka ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ;
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata dan bermanfaat;
3. Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan masyarakat adil dan demokrasi.

Sumber daya manusia (SDM) yang menguasai IPTEK dan IMTAQ infrastruktur yang berkualitas, merata dan bermanfaat, dan perekonomian yang berdaya saing tinggi serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan merupakan empat pilar utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan moral atau keimanan masyarakat sejahtera. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan moral atau keimanan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Oleh sebab itu, empat misi pertama berkaitan langsung dengan komponen visi tentang Provinsi Bengkulu adil dan demokratis.

Pembangunan daerah yang kokoh dapat memiliki daya saing yang tinggi apabila didukung oleh SDM berkualitas, infrastruktur yang mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Secara ekonomi, masyarakat yang mampu bersaing dengan masyarakat dari daerah-daerah lain atau dari negara-negara lain harus berpikiran maju dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai landasan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kemajuan tersebut harus dicapai atas usaha dengan menggunakan kekuatan sendiri.

Kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan demokratis harus menjadi ciri khas Provinsi Bengkulu dalam 20 tahun ke depan di tengah kemajuan perekonomian yang akan diwujudkan. Oleh sebab itu, pertumbuhan perekonomian yang kokoh harus diikuti dengan pemerataan pada semua lapisan masyarakat. Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan harus dimanfaatkan secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan sekaligus menjaga unsur keadilan bagi generasi yang akan datang.

Tujuan pembangunan Provinsi Bengkulu selama dua puluh tahun ke depan harus disusun sedemikian rupa agar Visi dan Misi pembangunan jangka panjang dapat tercapai pada tahun 2025, sedangkan indikasi keberhasilannya harus terlihat setiap periode lima tahun. Untuk menjamin terjadinya keterkaitan yang erat antara Visi, Misi dan Arah Kebijakan, maka berikut ini akan diuraikan Arah Pembangunan Jangka Panjang berdasarkan pengelompokan Misi atau Agenda Pembangunan. Setiap agenda dijabarkan terlebih dahulu ke dalam beberapa kebijakan yang diikuti dengan arah pembangunan jangka panjang dari masing-masing kebijakan.

Ukuran tercapainya Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan demokratis bertumpu pada sumber daya manusia unggul dan bertakwa serta perekonomian kokoh, maka pembangunan daerah 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut :

- A. Terwujudnya sumber daya yang menguasai IPTEK dan IMTAQ, ditandai dengan indikator sebagai berikut :
1. Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat dan aparatur pemerintah yang dicapai melalui perluasan pelayanan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
 2. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta gizi masyarakat. Indikator penting lainnya meliputi meningkatnya jenjang kesehatan masyarakat, terjaminnya aksesabilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan terpenuhinya gizi masyarakat, serta meningkatnya usia harapan hidup.
 3. Meningkatnya kualitas moral dan keimanan serta budaya masyarakat, seperti dijadikannya nilai-nilai moral dan keimanan sebagai pegangan hidup bermasyarakat dan bernegara, serta digunakannya nilai-nilai tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Indikator lainnya adalah seseorang takut kepada tuhan, serta malu kepada sesama jika berbuat jahat.
 4. Tercapainya pembangunan kependudukan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan lapangan kerja, seperti terkendalinya dinamika kependudukan termasuk pembangunan bidang pemuda dan olahraga, meningkatnya kesejahteraan sosial dan meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, juga meningkatnya kesejahteraan jiwa anggota masyarakat luas, meningkatnya produktivitas tenaga kerja serta menurunnya angka pengangguran.
- B. Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing tinggi, ditandai dengan indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya infrastruktur di bidang transportasi, antara lain meliputi meningkatnya akses bagi pergerakan orang dan barang dari dan menuju Provinsi Bengkulu, meningkatnya akses ke sentra-sentra produksi, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur transportasi.
 2. Meningkatnya infrastruktur di bidang kelistrikan, seperti meningkatnya pelayanan kelistrikan bagi masyarakat dan berkembangnya sumber-sumber energi kelistrikan terbarukan.
 3. Meningkatnya infrastruktur di bidang irigasi dalam menunjang sistem ketahanan pangan masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya dan nasional umumnya. Tolak ukur keberhasilan pembangunan jaringan adalah terjaganya cukup air irigasi dalam produksi pertanian.
 4. Meningkatnya infrastruktur di bidang informasi dan telekomunikasi sampai daerah terisolir, terpencil, kepulauan, dan transmigrasi, terutama meliputi meningkatnya peran teknologi informasi dan telekomunikasi dalam percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu.
 5. Meningkatnya infrastruktur di bidang air bersih dan perumahan dalam rangka meningkatkan system pelayanan dan pemerataan terhadap semua golongan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
- C. Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing tinggi, ditandai dengan indikator sebagai berikut :
1. Tercapainya struktur perekonomian yang kokoh dimana pertanian (dalam arti luas), pariwisata dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.
 2. Terwujudnya struktur perekonomian dengan mendudukkan sektor industri rakyat sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, pariwisata dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
 3. Tercapainya pengembangan industri berbasis sumber daya (*resource-based industries*), diantaranya seperti pengembangan industri yang mengolah secara efisien dan rasional sumber daya alam, dengan memperhatikan daya dukung; dengan mengembangkan pola jaringan rumpun industri (*industrial cluster*) sebagai fondasinya.
 4. Meningkatkan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas dikelola dengan pengembangan agribisnis dan agroindustri yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan.
 5. Terwujudnya perdagangan dan investasi yang mampu mendukung perkuatan daya saing global. Sementara itu, investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

6. Terwujudnya sektor jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan, sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi nasional agar mampu mendukung secara efektif peningkatan daya saing global.
 7. Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang mampu mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah, peningkatan kualitas perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi daerah.
 8. Meningkatnya peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas. Indikator lainnya adalah meningkatnya peranan ekonomi kerakyatan sebagai komponen utama pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu.
 9. Revitalisasi pertanian terwujud dengan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dalam rangka modernisasi perekonomian perdesaan. Sektor pertanian dalam arti luas dan sektor perindustrian menjadi basis aktivitas ekonomi.
 10. Penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seperti meningkatnya produktivitas, efisiensi dan daya saing produksi dalam menunjang pembangunan perekonomian di Provinsi Bengkulu.
 11. Penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan, antara lain berkurangnya jumlah masyarakat miskin dan jumlah pengangguran serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu di tingkat regional (Pulau Sumatera) dan nasional.
 12. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah, sebagai modal utama pembangunan.
 13. Terlaksananya otonomi daerah dan pengembangan regional, yang meliputi tertatanya sistem wilayah dan ruang, terjalinnnya kerjasama pembangunan sektoral dan daerah, berkembangnya daerah perkotaan dan perdesaan.
- D. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan secara berkelanjutan ditandai dengan indikator sebagai berikut :
1. Tercapainya pemanfaatan SDA pertanian secara berkelanjutan, seperti dimanfaatkan SDA pertanian termasuk kelautan dan perikanan yang tersedia di Provinsi Bengkulu agar diperoleh manfaat secara ekonomis namun sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tidak bertentangan dengan masyarakat.
 2. Tercapainya pemanfaatan SDA kehutanan dan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan, termasuk terpeliharanya fungsi hutan dan daerah tangkapan air meskipun sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomi.

3. Tercapainya pemanfaatan sumber daya mineral dan pertambangan secara ramah lingkungan.
 4. Tercapainya pengendalian SDA dan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya. Indikator penting lainnya adalah tertatanya wilayah dan ruang di Provinsi Bengkulu sehingga pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan daya dukung lingkungan yang tersedia.
 5. Terwujudnya penegakkan bagi keselamatan SDA dan lingkungan. Terutama pada terciptanya jaminan penegakkan hukum bagi kelestarian SDA dan lingkungan sehingga tetap tersedia bagi generasi berikutnya.
- E. Terwujudnya masyarakat yang adil dan demokratis ditandai dengan indikator sebagai berikut:
1. Terwujudnya penyempurnaan Struktur Politik dan Pelembagaan Demokrasi di Daerah, antara lain adalah terciptanya struktur politik yang mantap, pendidikan politik bagi masyarakat dan politikus yang memadai, komunikasi politik yang transparan, bertanggung jawab serta independen. Selain itu terciptanya sistem demokrasi agar diterima sebagai konsesus dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Provinsi Bengkulu.
 2. Terwujudnya penegakkan Supremasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, seperti penegakkan hukum yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif sehingga pelaksanaan pembangunan benar-benar orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang didukung oleh masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penegakkan hukum dan pengawalan pembangunan diharapkan terlihat secara dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Indikator penting lainnya adalah keterpaduan antara pembangunan keamanan dan keterlibatan masyarakat di daerah dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
 3. Terciptanya Sistem Pemerintahan yang baik, diantaranya seperti tuntasnya penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah, terciptanya etika birokrasi dan budaya kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, terwujudnya pelayanan prima dan *good governance* dalam pemerintahan daerah terbentuknya system rekrutmen yang bermutu dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien serta produktif.

IV.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

IV.1.1 Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas SDM di daerah tersebut, disamping kekayaan SDA yang dimilikinya. Kualitas SDM merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam menghadapi persaingan di era global serta untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain. Tinggi-rendahnya kualitas SDM dapat dilihat dari

kualitas pendidikan, kesehatan, dan moralitas. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas, pembangunan SDM di Provinsi Bengkulu diarahkan untuk meningkatkan : (a) akses, pemerataan, kualitas pendidikan masyarakat dan aparatur pemerintah, (b) meningkatkan pemerataan dan kualitas kesehatan dan gizi; (c) meningkatkan kualitas moral, keimanan, etika dan budaya, dan (d) melaksanakan pembangunan kependudukan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan lapangan kerja.

Dengan demikian untuk mewujudkan SDM yang unggul dapat ditempuh melalui :

A. Meningkatkan Akses, Pemerataan dan Kualitas Pendidikan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah

Untuk mencapai peningkatan akses, pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat dan aparatur diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TA, Raudhdhatul Adfal (RA), TPA, Kelompok Bermain, Pos PAUD, Balai Kegiatan Belajar (BKB).
2. Percepatan akses, pemerataan, dan peningkatan mutu Pendidikan Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, perguruan tinggi, pendidikan kedinasan dan pendidikan non-formal agar menjadi individu yang cerdas teori dan terampil berkarya, berdisiplin, dan nasionalis.
3. Peningkatan angka melek huruf bagi anggota masyarakat.
4. Peningkatan pendidikan non formal kepada masyarakat dengan program *Life Skill* (Kecakapan Hidup).
5. Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, seperti alat transportasi, sistem informasi, sumber belajar, media pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, dan pendidik baik lembaga pendidikan formal maupun nonformal sampai ke daerah terpencil dan kepulauan.
7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan terutama melalui pemberdayaan komite sekolah, dewan pendidikan, yayasan pendidikan, dan lembaga sosial lainnya yang bergerak dibidang pendidikan.
8. Peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan bagi semua umur dan lapisan masyarakat dan wilayah, termasuk daerah terpencil, terisolir, dan transmigrasi diikuti pula dengan penambahan tempat layanan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen layanan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
9. Peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat dan produktivitas kerja melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, supervise, serta *reward* dan *punishment*.

10. Pengembangan pendidikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, harkat, martabat, kualitas SQ, EQ, Soc.Q warga masyarakat sehingga mampu bersaing dalam menghadapi era global.
11. Peningkatan kualitas kompetensi hasil pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, diploma, dan strata di Provinsi Bengkulu, yang didukung peraturan-peraturan daerah yang mengatur standar mutu pendidikan di daerah.
12. Pengembangan pendidikan bagi aparatur pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan produktivitas dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya kearah peningkatan kualitas tersebut dapat ditempuh baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.
13. Peningkatan persentase anggaran pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Meningkatkan Akses, Pemerataan, Kualitas Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Untuk mencapai peningkatan akses, pemerataan, kualitas kesehatan dan gizi masyarakat diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.
2. Pemerataan pelayanan terhadap kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil
3. Pembangunan gizi masyarakat terutama anak-anak di bawah umur lima tahun (Balita) dan anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan hingga ke pelosok daerah. Unit-unit layanan gizi masyarakat di tingkat desa berupa pos-pos pelayanan terpadu perlu dikembangkan sehingga perkembangan gizi masyarakat dapat dipantau. Pemberian layanan gizi secara gratis kepada Balita dari golongan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui unit-unit pelayanan tersebut. Selain itu, perlu dikembangkan pelayanan kesehatan melalui program sekolah ssehat (*halthy school program*).
4. Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan dan pusat layanan KIE gizi perlu dikembangkan guna mendukung pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kualitas pelayanan kesehatan yang sama baiknya dengan yang diberikan di luar Provinsi Bengkulu.
5. Koordinasi lintas sector dan system kemitraan perlu dikembangkan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, melakukan *monitoring* terhadap perkembangan kesehatan dan gizi masyarakat, dan selanjutnya mengkoordinasikannya dengan instansi yang bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan dan gizi masyarakat.
6. Peningkatan pembinaan kepada keluarga sehingga persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif agar semakin meningkat.
7. Peningkatan layanan kesehatan sehingga persentase murid SD/MI mendapat pemeriksaan dan rawatan gigi mulut (GIMUL).

8. Peningkatan sarana, prasarana, dan tenaga medis di Rumah Sakit Jiwa dan ketergantungan obat, dan pembiayaan dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan, serta kualitas layanan kesehatan jiwa dan ketergantungan obat.
9. Peningkatan layanan dan pembinaan terhadap Posyandu menjadi Posyandu Purna Mandiri.
10. Peningkatan jumlah prevalensi akseptor keluarga berencana (KB).
11. Peningkatan layanan kesehatan terhadap ibu melahirkan sehingga setiap persalinan mendapat layanan dari tenaga kesehatan.
12. Peningkatan pembinaan Pola Hidup Sehat terhadap masyarakat.
13. Peningkatan layanan kepada penderita TBC dan penyakit menular lainnya.
14. Pengembangan dokumen Sistem dan Manajemen Kesehatan, *Distric Health Account, Contingecy Plan* kesehatan dalam keadaan bencana, dan melakukan Survei Kesehatan Daerah menyusun Profil Kesehatan pada setiap kabupaten/kota.
15. Implementasi pengaturan dan penegakan hukum terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, lebih rinci perlu diatur dalam peraturan daerah.

C. Meningkatkan Kualitas Moral, Keimanan, Etika dan Budaya

Untuk mencapai peningkatan kualitas moral, keimanan, etika dan budaya diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas moral dan keimanan masyarakat dilakukan melalui pemahaman dan pengalaman ajaran agama di semua aspek kehidupan termasuk keluarga, lembaga pendidikan, lembaga Negara, dan lembaga kemasyarakatan. Selain itu, sangat diperlukan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan seperti penyediaan Kitab Suci dan Terjemahan Al Qur'an bagi yang beragama Islam di semua lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, dan tempat-tempat ibadah. Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama menumbuhkan dukungan dari warga masyarakat; ketua adat, dan semua lapisan masyarakat dalam rangka menerapkan hukuman kepada para koruptor sesuai dengan Undang-Undang Negara yang berlaku, dengan demikian kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
2. Peningkatan peran kelembagaan keagamaan sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat. Kualitas pelayanan umum yang perlu ditingkatkan melalui peningkatan kualitas SDM aparatur yang diikuti dengan koordinator perencanaan yang baik. Lembaga pendidikan tradisional keagamaan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas lulusannya, sekaligus ikut mendukung program wajib belajar pendidikan menengah dua belas tahun.
3. Pelaksanaan *event-event* keagamaan tingkat daerah, nasional dan internasional perlu dilaksanakan karena dapat dijadikan sarana penyampaian pesan-pesan moral secara langsung kepada masyarakat. *Event-event* tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Provinsi Bengkulu, atau dengan cara mengirim delegasi ke *event-event* yang diselenggarakan di daerah atau negara lain.

4. Pembangunan kerukunan hidup umat beragama yang diarahkan untuk menjaga keserasian hidup antara sesama umat dari agama yang sama dan antar umat yang berbeda agama. Rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat perlu diwujudkan sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh rasa toleransi, tenggang rasa dan keharmonisan.
5. Penggalan terhadap nilai-nilai agama dan sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk dijadikan barometer moral dalam kehidupan sehari-hari.
6. Menjadikan nilai-nilai agama dan hukum Negara sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan terutama yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Upaya ini dimaksudkan untuk membangun dan memantapkan jati diri dan karakter daerah yang bertumpu pada kombinasi antara nilai-nilai luhur daerah.
7. Mengembangkan hukum adat sejalan dengan nilai-nilai religius dan hukum Negara, kebersamaan dan persatuan dengan etos kerja tinggi. Penanaman nilai-nilai agama dan memanfaatkan hukum adat kepada masyarakat diharapkan dapat meredam berbagai gejolak yang muncul dalam masyarakat, serta menjadi landasan yang kokoh bagi usaha-usaha pembangunan di masa yang akan datang. Dengan menegakkan hukum adat dikaitkan dengan agama, dan sinkron dengan hukum negara diharapkan dapat mengajak partisipasi masyarakat untuk mengontrol harmoni anggota masyarakat, lingkungan, dan Negara serta mengurangi beban negara yang tidak mungkin dapat mengontrol seluruh masyarakat, serta mengurangi kecurangan hukum oleh penegakkan hukum.
8. Membangun kesehatan mental sosial masyarakat melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk beribadat dan mendapatkan layanan keagamaan yang lebih berkualitas.
9. Mengembangkan sistem sosial budaya yang dilandasi nilai-nilai agama dan kultural yang dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat, serta mampu meningkatkan disiplin, gemar bekerja, dan produktif.
10. Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan budaya masyarakat Provinsi Bengkulu yang bernilai luhur sebagai modal dasar pembangunan.

D. Melaksanakan Pembangunan Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Lapangan Kerja

Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan kependudukan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan lapangan kerja diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan keluarga berencana, peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi, penguatan kelembagaan menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Pertumbuhan jumlah penduduk perlu dikontrol sedemikian rupa agar kualitas hidup masyarakat terjamin guna mendapatkan SDM yang berkualitas, peningkatan sikap dan perilaku positif pada remaja kearah kesehatan reproduksi, dan ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penataan administrasi kependudukan.

2. Pembanguann ketenagakerjaan diarahkan melalui penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja melalui investasi, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pengembangan lembaga tenaga kerja, menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, *outsourcing*, pengupahan, perlindungan dan PHK.
3. Pembangunan bidang transmigrasi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan daerah, menjadikan peluang berusaha dan kesempatan kerja dengan prospek dan jaminan kepastian usaha, peningkatan mutu kehidupan transmigran dan penduduk sekitarnya.
4. Pembangunan pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja serta membentuk bursa kerja serta memperbaiki sistem pelatihan bagi pencari kerja, serta memberik kemudahan dan bantuan kepada pencari kerja baru.
5. Pembangunan pemuda diarahkan peningkatan iklim kondusif bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan minat, mewujudkan generasi muda yang tangguh, berdayaguna dan berhasilguna bagi kesinambungan pembangunan daerah, peningkatan budaya olahraga di kalangan masyarakat, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional.
6. Peningkatan pembangunan olahraga diarahkan untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka mendukung pembinaan dan pemsyarakatan olahraga; meningkatkan budidaya olahraga, kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat dan peserta didik dari anak usia dini sampai pendidikan tinggi agar menghayati olahraga menjadi kebutuhan hidup; pemanduan bakat dan pembibitan olahraga sejak usia dini untuk mendukung upaya pencapaian prestasi olahraga dikaitkan dengan pembangunan sosial ekonomi, untuk meningkatkan citra bangsa, memperkuat kelembagaan olahraga, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatih, peneliti, praktisi, teknisi olahraga, dan efektivitas serta efisensi manajemen olahraga.
7. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna. Upaya ini perlu didukung oleh peraturan daerah tentang perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial penyusunan dan penataan sistem kesejahteraan sosial daerah (SKPD), dan penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.
8. Sistem perlindungan dan jaminan sosial dan rehabilitasi perlu dibangun dan dikembangkan guna memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat dan pelayanan sosial dasar bagi korban bencana alam dan sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah, dan terlaksananya sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, PMKS lainnya. Pembangunan sistem perlindungan dan jaminan sosial perlu didukung oleh peraturan daerah dan pendanaan yang memadai, serta sistem pendataan yang mutakhir seperti pengembangan sistem nomor induk kependudukan yang memuat informasi tentang kesejahteraan sosial penduduk.
9. Peningkatan pemberdayaan fakir miskin, komunitas daerah terpencil, dan PMKS lain.

10. Peningkatan kualitas dan manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial melalui penelitian, penataan sistem dan pengembangan alternatif pelayanan sosial, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, penetapan standarisasi dan akreditasi pelayanan, pengembangan sistem informasi penanganan masalah, dan penataan sistem peraturan dan perundang-undangan dan sosialisasinya.
11. Pembangunan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan anak (PUA), serta pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anakn diberbagai bidang pembangunan. Keberhasilan pembangunan ini ditandai dengan menurunnya tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Kelembagaan perempuan dan anak perlu diperkuat hingga ke tingkat daerah termasuk penyediaan data statistik tentang gender dan anak.
12. Implementasi pengaturan dan penegakan hokum terhadap tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Sasaran dari kebijakan ini adalah jaminan penegakan hukum terhadap korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

IV. 1.2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, Merarta dan Bermanfaat

Provinsi Bengkulu terletak di kawasan barat Pulau Sumatera yang merata yang secara geografis terpisah dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional dan internasional. Untuk mengatasi kendala geografis tersebut maka Provinsi Bengkulu harus memiliki infrastruktur yang maju sehingga mampu menembus keterisoliran dari pusat-pusat perekonomian regional dan internasional. Pembangunan infrastruktur strategis yang dilakukan di Provinsi Bengkulu meliputi transportasi, ketenagalistrikan, telematika, irigasi dan penyediaan air bersih serta perumahan.

A. Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Bidang Transportasi

Untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur bidang transportasi diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan laju pergerakan orang, barang dan jasa melalui penyediaan pelayanan jalan yang nyaman, aman dan berkualitas yang dapat menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi lain, serta malalui peningkatan pelayanan transportasi laut dan udara. Pengguna jasa transportasi perlu diberi banyak pilihan alternative yang sesuai dengan kebutuhan dan daya jangkau masyarakat.
2. Pembangunan dan peningkatan transportasi jalan untuk memperbaiki alinemen horizontal dan vertical pada batas Bengkulu-Lampung dan Sumatera Barat pada jalan Lintas Barat Sumatera dan *feeder road* utama yang menghubungkan Bengkulu-Kepahiang-Lubuk Linggau (Provinsi Sumatera Selatan) dan Bintuhan-Tanjung Iman-Muara Saung-Martapura (Provinsi Sumatera Selatan) sehingga sesuai dengan standar jalan nasional.

3. Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan difokuskan pada penetapan standar Muatan Sumbu Terberat (MST 10 ton) untuk menjamin kualitas jalan terpenuhi.
4. Peningkatan terminal Bis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang berskala besar dan peningkatan terminal Bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang sudah ada guna meningkatkan sistem pelayanan transportasi darat, baik untuk antar kota maupun antar Provinsi.
5. Pengembangan sistem jaringan jalan (*road network*) untuk menunjang transportasi darat rangka system transportasi wilayah dan nasional (sistrawil dan sistranas).
6. Pengembangan jalur lintas barat Sumatera sebagai "*trunklin*" (jalur lintas utama) yang menghubungkan Aceh-Sumbar-Bengkulu-Lampung dalam suatu sistem jaringan transportasi wilayah (SISTRRAWIL) agar tumbuh jalur pengembangan baru di Pulau Sumatera, yang merupakan rencana bagian dari *Trans Asean Highways*.
7. Pengembangan jalur penghubung lintas barat (JALINBAR) dengan jalur lalu lintas tengah (JALINTENG) dan jalur lintas timur (JALINTIM) pulau Sumatera, agar Provinsi Bengkulu menjadi bagian kawasan segitiga pertumbuhan SIJORI dan IMT-GT.
8. Pembangunan jalan kereta api pada jalur Bengkulu-Kota Padang Rejang, dengan rute: Pulau Baai-Kota Niur-Kepahiang-Sinar Gunung-Kota Padang Rejang dan jalur Bengkulu-Padang (Provinsi Sumatera Barat), dengan rute : Kota Bengkulu-Ketahun-Mukomuko-Painan-Padang, serta jalur Linau-Tanjung Enim (Provinsi Sumatera Selatan), yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan provinsi-provinsi lain dilaksanakan guna mendapatkan sistem transportasi barang, orang dan jasa yang cepat, murah dan nyaman. Pembangunan jalan kereta api diarahkan untuk meningkatkan peran Pelabuhan Pulau Baai sebagai pelabuhan internasional.
9. Pembangunan transportasi juga diarahkan untuk meningkatkan kelancaran pengangkutan hasil bumi dari sentra-sentra produksi guna mempercepat peningkatan produktivitas di sector pertanian. Jalan-jalan produksi seperti ditekan dan penghasilan masyarakat meningkat. Jalan menuju obyek-obyek wisata dan sentra-sentra ekonomi lain perlu dibangun dan ditingkatkan sehingga pendapatan asli daerah juga meningkat.
10. Pembangunan jalan *Feeder Road* pendukung yang menghubungkan Tanjung Sakti-Lahat (Provinsi Sumatera Selatan) dan Kabupaten Kepahiang-Pagar Alam-Lahat (Provinsi Sumatera Selatan) serta Padang Capu-Air Kelinsar-Pagar Alam yang diperlukan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa antara wilayah serta untuk mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
11. Pengaturan jalan secara umum meliputi pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa serta pengaturan jalan kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.
12. Pembangunan penambahan panjang dan peninggian *Break Water* pelabuhan Pulau Baai untuk meredam terjadinya pendangkalan di alur pelabuhan yang disebabkan

oleh banyaknya sedimen yang masuk dan menumpuk sehingga pelabuhan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

13. Pengembangan masterplan pelabuhan Pulau Baai menjadi pelabuhan Internasional atau pelabuhan utama sekunder yang memiliki peran dan fungsi melayani kegiatan bongkar muat penumpang dan barang nasional yang berskala besar dalam rangka pengembangan Kota Bengkulu sebagai Pusat Kegiatan nasional (PKN) dan Pulau enggano sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN).
14. Pengembangan sistem pelayanan angkutan penyebrangan dengan membuka rute-rute yang baru guna mendukung system wilayah pariwisata bahari diantaranya adalah rute Pualu Baii-Pulau Tikus-Pantai Jakat, Linau (Kabupaten Kaur)-Kahyapu-Malakoni (Pulau Enggano) dan Ketahun (Bengkulu Utara)-Kahyapu-Malakoni (Pulau enggano).
15. Pembangunan dan pengembangan masterplan pelabuhan udara Fatmawati Soekarno diarahkan untu dapat melayani jenis pesawat-pesawat yang berbadan lebar.
16. Implementasi pengaturan dan penegakkan hukum dalam kaitannya dengan bidang transportasi diarahkan pada terwujudnya penataan dan pemeliharaan sarana transportasi secara baik

B. Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Bidang Kelistrikan

Untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur bidang kelistrikan diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Diversifikasi energi untuk pembangkit listrik perlu dilakukan seperti pemanfaatan panas bumi, hidro dan batubara, migas termasuk upaya penerapan pembangkit listrik tenaga surya yang sudah mulai diterapkan di kawasan terpencil. pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di setiap kawasan. Sumber-sumber energi alternatif dapat dimanfaatkan secara luas untuk mensuplai kebutuha listrik bagi masyarakat luas atau hanya dimanfaatkan dalam skala kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
2. Pemanfaatan dan pengembangan batu bara dilakukan sebagai sumber energi alternatif dalam rangka efisiensi dan mengatasi kelangkaan BBM untuk jangka waktu yang panjang. Pengembangan potensi sumber daya air yang ada perlu dilakukan menjadi hydropower yang dapat menghasilkan sumber energi ketenagalistrikan dalam rangka untuk mengatasi semakin menipisnya cadangan BBM untuk jangka waktu yang akan datang.
3. Pemanfaatan dan pengembangan tanaman jarak dan tanaman lain yang mengandung Bio energi termasuk energi biomass yang berasal dari cangkang sawit, sekam padi, kotoran ternak dan sampah, dapat digunakan sebagai energi alternatif dalam rangka untuk efisiensi dan mengatasi kelangkaan BBM untuk jangka waktu yang panjang.
4. Pemanfaatan energi gelombang laut sebagai energi alternatif untuk efisiensi dan mengatasi kelangkaan BBM untyuk jangka waktu yang panjang.

5. Mendorong terwujudnya interkoneksi jaringan listrik se Sumatera dalam rangka meningkatkan pasokan tenaga listrik agar mampu memenuhi pasokan tenaga listrik secara berkelanjutan termasuk di wilayah Provinsi Bengkulu.

C. Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Bidang Informasi Dan Telematika

Untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur bidang informasi dan telematika diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembangunan bidang informasi dan telematika diarahkan pada aspek jaringan infrastruktur telematika terutama yang berhubungan dengan teknologi informasi baik perangkat keras maupun lunak guna menuju era sistem pemerintahan elektronik (*e-government*) yang efektif dan efisien. Sistem koordinasi dalam jajaran pemerintahan dan antara pemerintah dengan stakeholder lain ke depan harus dilakukan secara cepat dan tepat melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Selain itu, dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan dibutuhkan ketersediaan data dan informasi yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan program penyempurnaan dan pengembangan statistik yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat dan tepat waktu melalui berbagai sensus, survey, studi dan kompilasi produk administrasi untuk mendukung semua bidang pembangunan daerah dan nasional. Dalam kaitan ini peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM di bidang teknis dan manajemen statistik serta komputasi data dan administrasi, dan pengembangan sistem informasi statistik, sistem informasi geografis, diseminasi informasi statistik, dan sistem informasi manajemen guna mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan memenuhi kebutuhan informasi dan data statistik bagi pemerintah maupun stakeholder. Untuk memperlancar arus informasi data diseluruh Provinsi Bengkulu, maka prasarana sarana komunikasi yang mampu melayani sistem informasi data sangat mendesak untuk dikembangkan.
2. Sistem informasi komoditi harapan, andalan dan unggulan Provinsi Bengkulu perlu terus dikembangkan guna meningkatkan posisi tawar masyarakat produsen terhadap pasar. Model-model informasi komoditi sudah ada seperti "terminal agribisnis" dan "sub-terminal agribisnis" yang mampu menjadi penghubung antara pasar dan produsen perlu terus dikembangkan agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi pasar yang luas.
3. Pengembangan sistem jaringan informasi diarahkan untuk sistem pelayanan umum yang efisien dan keterjangkauan dari semua kalangan masyarakat, baik masyarakat kalangan ekonomi menengah maupun kalangan ekonomi rendah. Upaya lain adalah meningkatkan sarana dan prasarana sistem informasi yang ada menjadi lebih canggih dan berdaya saing yang tinggi.
4. Pengembangan sistem jaringan informasi diarahkan untuk sistem pelayanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang efisien dan keterjangkauan bagi semua pelajar, mahasiswa dan masyarakat, baik untuk pelajar, mahasiswa,

masyarakat kalangan ekonomi menengah maupun kalangan masyarakat ekonomi rendah.

D. Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Bidang Irigasi

Untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur bidang irigasi diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembangunan jaringan irigasi diarahkan untuk menambah cakupan air bagi masyarakat petani dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Kebijakan ini harus didukung oleh upaya pelestarian daerah tangkapan air sebagai sumber air irigasi dan efisiensi pemanfaatan air irigasi agar cakupan penggunaan air dapat meningkat.
2. Jaringan irigasi dibangun dengan memperhatikan azas daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan sumber daya air, daya dukung lahan persawahan, dan daya dukung SDM yang akan memanfaatkan jaringan irigasi tersebut.
3. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada dilakukan untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Masyarakat petani perlu dibina agar ikut bertanggungjawab dalam pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
4. Pengembangan sistem jaringan irigasi dari non teknis menjadi irigasi teknis perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dan produktif untuk kebutuhan masyarakat petani termasuk dalam rangka mewujudkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Selain itu, sistem organisasi masyarakat petani pemakai air perlu dikembangkan, sehingga terciptanya kelestarian dan keadilan dalam pengaturan akan kebutuhan air.
5. Pemanfaatan dan pengembangan air buangan PLTA Musi untuk pengembangan jaringan irigasi, air bersih dan pariwisata.

E. Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Bidang Air Bersih dan Perumahan

Untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur bidang air bersih dan perumahan diupayakan melalui langkah-langkah ssebagai berikut :

1. Pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana air bersih diarahkan untuk meningkatkan sistem pelayanan dan kualitas air bersih. Pelayanan penyaluran air bersih harus mampu menjangkau semua lapisan masyarakat sehingga kualitas air yang diperoleh masyarakat tetap terjamin.
2. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih harus mampu mengurangi tingkat kebocoran dalam rangka efisiensi dan mendapatkan harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Kualitas SDM perlu ditingkatkan agar mampu memantau terjadinya kebocoran dalam jaringan penyaluran air bersih sampai ke masyarakat.
3. Pembangunan perumahan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh sarana dan

prasarana pendukungnya harus mampu membangkitkan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari masyarakat dan lembaga permodalan.

4. Pembangunan perumahan dan sarana prasarana pendukungnya harus memenuhi aspek berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Lokasi perumahan tidak ditempatkan pada kawasan-kawasan yang rawan lingkungan seperti daerah tangkapan air dan sempadan sungai, atau pada kawasan yang memiliki resiko terjadinya bencana alam seperti longsor, banjir dan tsunami.
5. Pengembangan dan pembangunan perumahan diarahkan pada sistem tata ruang daerah dan lingkungan hidup, sehingga akan tertata sesuai dengan program pemerintah daerah dan tercipta sistem perumahan yang ramah lingkungan. Pengembangan perumahan harus dilakuakn sesuai dengan standar mutu bangunan yang mengacu pada aturan-aturan yang baku untuk standar mutu perumahan yang tahan, kokoh dan layak huni yang sesuai dengan aturan pemerintah. Selain itu, pengembangan pembangunan perumahan diarahkan untuk terciptanya sistem pengembangan kawasan wilayah perkotaan atau perdesaan yang bernuansa sehat.
6. Pembangunan juga difokuskan untuk system penangan dan pengendalian banjir serta pengamanan pantai guna menjaga terjadinya abrasi pantai dan keseimbangan lingkungan.

IV. 1.3 Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi

Peningkatan perekonomian daerah merupakan suatu upaya jangka panjang yang harus melibatkan banyak sektor dan komponen pembangunan. Komponen-komponen pembangunan ekonomi yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah kebijakan ekonomi makro, reorientasi pembangunan sektor pertanian yang masih akan mendominasi perekonomian Provinsi Bengkulu, peningkatan peran ekonomi kerakyatan, penguasaan IPTEK, industri berbasis sumber daya lokal, penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang ekonomi. Komponen-komponen pembangunanan tersebut perlu dikembangkan secara terpadu agar upaya pencapaian kemajuan perekonomian daerah selama 20 taun ke depan dapat terwujud.

A. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro

Untuk mencapai peningkatan laju pertumbuhan ekonomimakro diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp. 8,33 juta, dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5%. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh.

2. Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas melalui penguasaan, penyebaran, penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan; mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik, dan mengelola secara berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah.
3. Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, pariwisata, kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara efisien, modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
4. investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik, mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.
5. sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan, dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai dengan praktik terbaik internasional, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah ekonomi daerah, dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam pengembangan SDM dan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan pengembangan keprofesian tertentu.
6. perdagangan diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi yang efisien dan efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan: (a) berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau.
7. kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata.

B. Revitalisasi Pertanian

Untuk mewujudkan pelaksanaan revitalisasi pertanian diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Revitalisasi pertanian diarahkan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dalam rangka modernisasi perekonomian perdesaan. Sektor pertanian dalam arti luas dan sector perindustrian berbasis pertanian menjadi basis aktivitas ekonomi. Apabila dikelola secara efisien dan sinergis, kedua sektor tersebut dapat menghasilkan komoditi yang berkualitas melalui penegmbangan agroindustri yang berdaya saing. Agroindustri menjadi motor penggerak perekonomian Provinsi Bengkulu, didukung oleh sector jasa yang perannya terus meningkat guna menghasilkan pelayanan yang lebih bermutu dan berdaya saing.
2. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer, sektor pertanian dalam arti luas didorong agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi. Hal ini merupakan faktor strategis karna berkenaan dengan pembangunan perdesaan, penegntasan kemiskinan dan ketertinggalan, dan ketahanan pangan. Semua ini harus dilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian ke arah lebih maju dan lebih kokoh di era globalisasi.
3. Paradigma pemabangunan kawasan perdesaan harus diubah dari fungsi perdesaan sebagai pensuplai kebutuhan perkotaan menjadi fungsi perdesaan sebagai mitra sejajar perkotaan. Produk-produk yang dihasilkan di perdesaan bukan lagi berupa produk primer dengan nilai ekonomi yang rendah melainkan produk setengah jadi atau jadi yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sentra-sentra pemasaran perlu dikembangkan di perdesaan sehingga pertanian memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan apabila mereka memasarkan produknya secara individu.
4. Produktivitas di sektor pertanian ditingkatkan sehingga rasio antara kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan jumlah pekerja di sektor tersebut meningkat. Upaya tersebut dapat dicapai melalui penerapan sistem mekanisme pertanian sebagai pengganti tenaga kerja manusia, sementara tenaga manusia tersebut dapat dialihkan ke sektor lain seperti industri dan jasa.
5. Masyarakat perdesaan terutama petani perlu diberi kemudahan akses terhadap permodalan. Perlu dikembangkan skem-skem kredit usaha tani yang mempertimbangkan kelayakan usaha sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak (petani dan lembaga permodalan, seperti UPKD)

C. Meningkatkan Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk mencapai peningkatan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sasaran dan kebijakan ini antara lain adalah meningkatnya peranan ekonomi kerakyatan sebagai komponen utama pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Peranan UMKM perlu ditingkatkan agar memiliki daya saing yang tinggi sehingga dapat menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan dan memperkuat basis ekonomi daerah.
2. Pengembangan UMKM dan koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEK, dan berdaya saing dengan produk impor khususnya dalam

penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian daerah. Untuk itu pengembangan UMKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi, perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Selanjutnya dilakukan pula upaya perkuatan akses UMKM pada sumber pendanaan melalui berbagai kebijakan baik berupa kebijakan mediasi, penjaminan kredit, maupun kebijakan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro.

3. Pengembangan UMKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan meningkatkan kualitas SDM. Sebagai pelaku ekonomi, UMKM perlu diberi kemudahan akses terhadap lembaga-lembaga permodalan sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya.

D. Meningkatkan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Untuk mencapai peningkatan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengembangan IPTEK memiliki tiga sasaran penting, yakni untuk dijadikan acuan dalam pemecahan masalah-masalah pembangunan, landasan dalam pengambilan kebijakan suatu institusi, dan untuk pengembangan IPTEK itu sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan IPTEK diarahkan untuk mampu menguasai, menghasilkan dan memanfaatkan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Pembangunan IPTEK juga diarahkan agar pembangunan di Provinsi Bengkulu tetap berlandaskan pada azas kelestarian fungsi sumber daya dan lingkungan hidup.
2. Pengembangan IPTEK untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemanfaatan IPTEK dalam rangka mendukung daya saing global. Hal ini dilakukan melalui peningkatan penguasaan dan penerapan secara luas IPTEK di dalam sistem produksi, pengembangan lembaga penelitian yang memiliki kemandirian di dalam pembiayaan, perwujudan sistem pengakuan atas hasil temuan (*royalty system, patent, HKI*) dan kualitas produk (SNI, ISO), penerapan standar mutu mengacu pada sistem pengukuran, standarisasi, pengujian dan mutu, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana IPTEK. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan untuk keterkaitan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.
3. Penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK di Provinsi Bengkulu dimaksudkan untuk menjadikan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK sebagai pedoman umum kebijakan daerah. Penggunaan IPTEK dimaksudkan untuk

kesejahteraan masyarakat dengan focus kajian pada agribisnis dan agroindustri sebagai lokomotif pembangunan. Program IPTEK di bidang pertanian diarahkan pada pengembangan sumber daya pertanian, teknologi tepat guna dan komoditas strategis, peningkatan nilai tambah pertanian, percepatan inovasi pertanian, dan pengembangan kelembagaan pertanian.

4. Pembangunan IPTEK di Provinsi Bengkulu juga diarahkan untuk mendukung ketersediaan energi, teknologi informasi dan komunikasi, serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengembangan ketiga komponen IPTEK tersebut harus dilakukan dalam konteks peningkatan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan.
5. Dukungan terhadap pembangunan IPTEK dilakukan melalui pengembangan SDM IPTEK, peningkatan anggaran riset, perumusan kebijakan riset yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan peningkatan sinergisme lembaga-lembaga IPTEK yang ada di Provinsi Bengkulu. Pembangunan IPTEK di Provinsi Bengkulu perlu memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Kerjasama dengan lembaga-lembaga IPTEK nasional dan internasional perlu dikembangkan. Dunia usaha perlu dilibatkan dalam pembangunan IPTEK agar produk-produk riset dapat dikembangkan menjadi industri-industri yang berdaya saing tinggi.

E. Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya (*Resource-Based Industries*)

Untuk mewujudkan pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya (*Resource-Based Industries*) diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dukungan dan pengembangan industri berbasis sumber daya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri yang bermuara pada terciptanya sistem ekonomi biaya rendah sehingga terjangkau oleh masyarakat. Industri dikembangkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang tersedia sehingga dapat menekan biaya produksi. Upaya ini dapat menghasilkan sistem perekonomian daerah berdaya saing tinggi di era globalisasi.
2. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, perlu membangun fondasi kegiatannya dengan menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat dengan 3 (tiga) prinsip dasar: (1) pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2) Penguatan hubungan antar-industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain meliputi sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas (*Metrology, Standardization, Testing and Quality/MSTQ*), serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.

3. Pembangunan industri berbasis sumber daya diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing baik di pasar domestik maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar (*good corporate governance*). Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri berskala besar.
4. Pengembangan industri yang berbasis SDA diarahkan pada upaya mengembangkan diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil SDA agar mampu meningkatkan nilai tambah, termasuk untuk meningkatkan daya saing dalam merebut pasar global. Namun pemanfaatan SDA sebagai basis industri harus tetap memperhatikan aspek pemeliharaan SDA sebagai basis industri harus tetap memperhatikan aspek pemeliharaan SDA yang ada dan sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Masyarakat lokal harus tetap diberi akses terhadap pemanfaatan SDA di sekitarnya untuk pengembangan industri dalam rangka meningkatkan penghasilan dan pendapatan mereka.
5. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal.pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dan investasi SDM.

F. Menanggulangi Kemiskinan dan Ketertinggalan

Untuk menanggulangi kemiskinan dan ketertinggalan diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengurangan jumlah masyarakat miskin dan jumlah pengangguran serta meningkatnya Indeks Pembangunan manusia (IPM) Provinsi Bengkulu di tingkat regional (Pulau Sumatera) dan nasional. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan daerah sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.
2. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam konteks peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan perekonomian daerah.

3. Provinsi Bengkulu ke depan harus mampu mensejajarkan diri dengan Provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dalam waktu dua puluh tahun kedepan, indeks IPM Provinsi Bengkulu harus berada posisi tiga besar di Pulau Sumatera dan sepuluh besar di Indonesia. Untuk itu, pembangunan di Propinsi Bengkulu harus dilakukan secara terpolo sedemikian rupa sehingga mampu membangkitkan semua potensi yang tersedia. Langkah-langkah jangka panjang yang dapat diambil adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan strategis, mengembangkan akses transportasi dan informasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan melakukan pembangunan secara khusus di kawasan-kawasan terpencil dan tertinggal.

G. Meningkatkan kualitas Pelayanan yang berkaitan dengan Perekonomian Daerah

Untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan perekonomian daerah diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan eketivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
2. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non diskriminatif; menjaga persaingan usaha secara sehat mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat dan perlindungan konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai daerah sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi.
3. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatn. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari dalam daerah sendiri perlu dioptimalkan. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi

H. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pengembangan Wilayah

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi dan pengembangan wilayah diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan otonomi daerah dan pengembangan wilayah dalam rangka tertatanya sistem wilayah dan ruang, terjalannya kerjasama pembangunan sektoral dan daerah, berkembangnya kawasan khusus dan tertinggal, dan berkembangnya daerah perkotaan dan perdesaan. Pembangunan ekonomi tidak hanya dilakukan melalui pendekatan kawasan lintas sektor. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi di suatu

kawasan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang menjadi tanggung jawab semua sektor secara terpadu dan terkoordinasi.

2. Pembangunan kawasan khusus diarahkan pada pengembangan potensi yang khas dan unik di kawasan tersebut seperti potensi pariwisata, pertambangan, keanekaragaman hayati dan komoditi khas lainnya. Keberadaan potensi tersebut perlu dikembangkan secara optimal sehingga dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat dan sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis komoditi unggulan. Dengan demikian, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat berkembang diberbagai kawasan khusus dengan potensi yang beragam.
3. Transmigrasi merupakan salah satu pola pembangunan wilayah yang perlu ditata secara efektif dengan memperhatikan azas fungsional dan profesional. Program transmigrasi di Provinsi Bengkulu tidak boleh dianggap sebagai program "pemindahan kemiskinan" melainkan sebagai program "pemindahan keahlian" dari satu daerah atau kawasan ke daerah atau kawasan lain. Dengan demikian, keberadaan transmigran di suatu kawasan dapat transfer keahlian kepada masyarakat lokal.
4. Pembangunan Pulau Enggano diarahkan pada peningkatan produktivitas, taraf hidup masyarakat, dan kuantitas serta kualitas SDM. Untuk pengembangan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN). Langkah pembangunan jangka panjang pertama yang perlu diambil adalah pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar seperti transportasi, energi kelistrikan, komunikasi dan informasi, air bersih, perumahan, dan industri berbasis keunggulan lokal seperti perikanan, perkebunan dan pariwisata. Selanjutnya, langkah tersebut diikuti dengan penguatan SDM, penguatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan investasi swasta, dan pengintegrasian pengembangan Pulau Enggano dalam kerangka kerjasama pulau terluar di Pantai Barat Pulau Sumatera.
5. Perkotaan dan perdesaan tidak boleh dianggap sebagai dua kawasan terpisah, dimana perdesaan difungsikan sebagai pemasok bahan baku bagi kebutuhan masyarakat dan industri di perkotaan. Ke depan, perdesaan harus ditempatkan sebagai mitra yang sejajar bagi perkotaan melalui sistem pengembangan kawasan yang terintegrasi. Kawasan perdesaan dapat difungsikan sebagai sentra-sentra produksi mulai dari produk primer sampai produk jadi atau setengah jadi, sedangkan kawasan perkotaan difungsikan sebagai sentra pemasaran dan informasi.
6. Pembangunan kawasan perdesaan didorong melalui pengembangan kawasan agropolitan terutama pada kawasan-kawasan yang berbasis pertanian. Kapasitas SDM pedesaan perlu ditingkatkan terutama dalam kaitannya perdesaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam perdesaan yang berdekatan perlu ditingkatkan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan.
7. Meningkatkan peran Sub-Wilayah Pembangunan. Dalam paradigma baru, pembangunan tidak lagi dilakukan berdasarkan kebijakan sektor per sektor, melainkan terfokus pada kebijakan kewilayahan yang melibatkan berbagai sektor secara

terintegrasi. Penetapan wilayah pembangunan dilakukan melalui penilaian terhadap potensi sumber daya sehingga dapat melalui penilaian terhadap potensi sumber daya sehingga dapat dikembangkan menjadi penggerak utama, pembangunan. Guna mempermudah implementasi maka pembagian wilayah pembangunan dilakukan menurut batasan administrasi pemerintahan. Dalam RTRW Provinsi Bengkulu ditetapkan 11 wilayah pembangun (WP) sebagai berikut :

- a. **WP Bengkulu;** berpusat di Kota Bengkulu, mencakup wilayah Kota Bengkulu, Kecamatan Sukaraja (kabupaten Seluma), Kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi, Taba Penanjung, Pagar jati, Pondok Kelapa dan Pematang Tiga (Kabupaten Bengkulu Utara). Dengan luas lahan 186.346 ha. Kegiatan perekonomian dan produksi yang menonjol pada WP ini adalah perdagangan dan jasa, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut dan pariwisata. Kegiatan perekonomian yang potensial di masa yang akan datang adalah pertambangan dan peternakan, industri pengolahan dan kerajinan.
- b. **WP Kepahiang;** berpusat di simpul Kepahiang, mencakup wilayah Kabupaten kepahiang dengan luas lahan 66.480 ha. Kegiatan perekonomian dan produksi yang menonjol pada WP ini adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, perdagangan dan jasa. Pariwisata dan peternakan, perikanan darat dan industri.
- c. **WP Curup;** berpusat di simpul Curup, mencakup wilayah Kabupaten Rejang Lebong dengan luas lahan 151.576 ha. Kegiatan perekonomian dan produksi yang menonjol pada WP ini adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa antar wilayah. Kegiatan perekonomian yang potensial di masa datang adalah peternakan, perikanan darat dan industri.
- d. **WP Muara Aman;** berpusat di simpul Muara Aman, mencakup wilayah Kabupaten Lebong dengan luas lahan 192.926 ha. Kegiatan perekonomian dan produksi yang menonjol pada WP ini adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan pertambangan. Kegiatan perekonomian yang potensial di masa datang adalah perdagangan dan jasa antar wilayah, pariwisata, peternakan, perikanan, perikanan darat dan pertambangan dengan teknologi baru.
- e. **WP Argamakmur;** berpusat di simpul Argamakmur, mencakup wilayah Kabupaten Bengkulu Utara bagian tengah (Kecamatan Argamakmur), Girimulya, Padamng Jaya, Kerkap, Air Napal, Air Napal, Air Besi, Lais dan Batiknau) dengan luas lahan 145.390 ha. Kegiatan perekonomian dan produksi yang menonjol di WP ini adalah perkebunan, pertanian tanaman pangan, serta perdagangan dan jasa intra dan antar wilayah. Kegiatan perekonomian yang potensial di masa datang adalah perikanan laut, pariwisata peternakan, pertambangan dan industri pengolahan produk pertanian.
- f. **WP Ketahun;** berpusat di simpul Ketahun/Giri Kencana, mencakup wilayah Kabupaten Bengkulu Utara bagian tengah (Kecamatan Ketahun, Napal Putih dan Putri Hijau) dengan luas lahan 257.010 ha. Kegiatan perekonomian yang potensial di masa datang adalah peternakan, perikanan laut, pariwisata, pertambangan dengan teknologi baru, perdagangan dan jasa intra wilayah, dan antar wilayah, Kegiatan perekonomian yang potensial di masa datang adalah peternakan,

perikanan laut, pariwisata, pertambangan dengan teknologi baru, perdagangan dan jasa intra wilayah, dan industri pengolahan produk pertanian.

- g. **WP Mukomuko**; berpusat di simpul Mukomuko mencakup wilayah Kabupaten Mukomuko dengan luas lahan 403.670 ha. Kegiatan perekonomian dan produksi yang menonjol di WP ini adalah perkebunan, pertanian tanaman pangan, serta perdagangan dan jasa intra dan antar wilayah. Kegiatan perekonomian yang potensial di masa datang adalah perikanan laut, peternakan, perikanan darat, pariwisata dan industri pengolahan hasil pertanian.
- h. **WP Tais**; berpusat di simpul Tais, mencakup wilayah sebagian besar Kabupaten Seluma bagian selatan (Kecamatan Seluma, Talo, Semidang Alas, Semidang Alas Maras, Air Periukan, Lubuk Sandi Sakti, Seluma Utara, Seluma Timur, Seluma Barat, seluma Selatan, Ulu Talo, Ilir Talo dan Talo Kecil). Dengan luas lahan 180.543 ha, kegiatan perekonomian dan produksi yang menonjol di WP ini adalah perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Kegiatan perekonomian yang potensial di masa datang adalah peternakan, perikanan laut, perikanan darat, pariwisata, pertambangan, serta perdagangan dan jasa intra wilayah.
- i. **WP Manna**; berpusat di simpul Manna, mencakup wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan luas lahan 117.870 ha. Kegiatan perekonomian dan produksi yang menonjol di WP ini adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, serta perdagangan dan jasa antar wilayah. Kegiatan perekonomian yang potensial di masa akan datang adalah peternakan, perikanan laut, perikanan darat, pariwisata, pertambangan dan industri pengolahan produk pertanian.
- j. **WP Bintuhan**; berpusat di simpul Bintuhan, mencakup wilayah Kabupaten Kaur dengan luas lahan 236.230 ha. Kegiatan perekonomian dan produksi yang menonjol di WP ini adalah perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Kegiatan perekonomian yang potensial di masa datang adalah perikanan laut, peternakan dan pariwisata.
- k. **WP Enggano**; merupakan wilayah *frontier* yang terletak di Pulau Enggano, terpisah relatif jauh dari daratan Pulau Sumatera dengan luas lahan 40.060 ha. Kegiatan perekonomian dan produksi yang menonjol saat ini adalah perikanan laut pada skala kecil dan belum berdampak nyata terhadap perekonomian wilayah yang potensial di masa datang adalah perkebunan, pariwisata bahari dan perikanan laut berikut industri pengolahannya. Faktor pendukung terpenting dalam pengembangan WP ini adalah pengembangan sarana transportasi.

Selama kurun waktu 20 tahun kedepan industri rakyat diharapkan mampu menjadi ujung tombak pembangunan. Industri rakyat yang yang dikembangkan hendaknya berbasis pada potensi sumber daya lokal yang terdapat di setiap kabupaten dan kota. Berikut ini diuraikan alternatif pengembangan industri rakyat di masing-masing kabupaten dan kota.

- 1) Kota Bengkulu dapat berperan dalam pengembangan SDM melalui sektor pendidikan. Program Bengkulu kota pelajar dapat ditumbuhkembangkan secara lebih nyata selama 20 tahun ke depan sehingga mampu menyediakan SDM yang memiliki kompetensi tinggi. Kompetensi SDM yang diinginkan meliputi kecerdasan dan

keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, baik oleh pemerintahan, swasta maupun industri, serta kecerdasan kewirausahaan agar mampu menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, daerah ini dapat berperan dalam menyediakan informasi pasar bagi produk-produk yang dihasilkan daerah lain. Posisinya sebagai ibukota provinsi sangat strategis dalam menjembatani sentra-sentra produksi yang berada di kabupaten dengan jaringan pasar yang ada di dalam dan luar negeri. Produk-produk dari daerah lain dapat diolah terlebih dahulu oleh industri-industri kecil dan menengah, termasuk industri rumah tangga, sebelum dipasarkan.

- 2) Kabupaten Bengkulu Utara memiliki potensi perkebunan yang sangat signifikan untuk dijadikan penggerak utama pembangunan. Dua komoditi yang paling dominan diusahakan di daerah ini adalah karet dan kelapa sawit. Pengembangan usaha perkebunan kedepan dapat diarahkan pada usaha perkebunan rakyat agar mampu meningkatkan perekonomian usaha perkebunan rakyat agar mampu meningkatkan perekonomian rakyat secara langsung. Perusahaan besar hanya dapat difasilitasi apabila memiliki pola kemitraan yang jelas dan perkebunan rakyat, seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil perkebunan yang dimiliki rakyat. Namun sejauh ini, hasil perkebunan baru diolah menjadi produk setengah jadi seperti CPO untuk kelapa sawit. Ke depan, pembangunan sub sektor perkebunan harus berorientasi agribisnis dengan mengembangkan produk-produk jadi yang bisa langsung dipasarkan kepada konsumen. Potensi areal perkebunan yang besar tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ternak melalui pola integrasi ternak-tanaman seperti integrasi sapi dan kelapa sawit (SISKA) yang sudah mulai dikenal masyarakat.
- 3) Kabupaten Mukomuko memiliki potensi yang relatif sama dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Daerah ini juga dapat dikembangkan menjadi sentra perkebunan rakyat terutama kelapa sawit. Pengembangan subsektor perkebunan di Kabupaten Mukomuko dapat dilakukan secara terintegrasi dengan sentra-sentra perkebunan di sekitarnya seperti Kabupaten Bengkulu Utara dan kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera barat. Pola kerjasama pembangunan yang demikian dikenal sebagai pola pengelolaan regional (*regional management*). Pola integrasi tanaman perkebunan dengan ternak masih perlu digiatkan karena masyarakat belum begitu mengenal sistem tersebut.
- 4) Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dalam pengembangan komoditi hortikultura. Dengan telah ditetapkannya daerah ini sebagai kawasan agropolitan sayuran dataran tinggi, Kabupaten Rejang Lebong memainkan peran yang strategis dalam menghasilkan PAD melalui subsektor hortikultura. Oleh sebab itu, pembangunan subsektor hortikultura di daerah ini dapat lebih dititikberatkan pada skala agribisnis agar nilai tambah yang diperoleh masyarakat dan daerah semakin meningkat. Letak geografis yang sangat strategis, yakni sebagai daerah yang memiliki akses terdekat ke jalur lintas Sumatera, kabupaten Rejang Lebong dapat pula dikembangkan sebagai pintu gerbang pemasaran produk-produk Provinsi Bengkulu ke pasar regional dan nasional.

- 5) Kabupaten Lebong memiliki karakteristik wilayah yang khas karena sebagian besar wilayahnya merupakan taman nasional, hutan lindung dan cagar alam. Oleh sebab itu, Kabupaten Lebong telah ditetapkan sebagai kabupaten konservasi, baik oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat. Pembangunan sektor-sektor yang ada di daerah ini harus mengacu pada prinsip-prinsip konservasi dengan segala rambu-rambu yang ada. Kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah perlu dirancang sedemikian rupa agar upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat tetap dapat dicapai tanpa harus bertentangan, bahkan saling mendukung dengan kegiatan konservasi.
- 6) Kabupaten Kepahiang memiliki potensi agrowisata yang dapat dikembangkan sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat dan daerah. Letak geografis sub-wilayah ini sangat strategis karena merupakan persimpangan dari jalur menuju Kota Bengkulu, lintas Sumatera melalui Kota Lubuk Linggau, dan Kota Pagar Alam. Posisi yang demikian dapat dimanfaatkan untuk menjadikan Kepahiang sebagai simpul pariwisata bagi objek-objek wisata yang tersebar di sub-wilayah sekitarnya, baik dalam wilayah Provinsi Bengkulu maupun Provinsi tetangga, dengan menggunakan pola regional management. Potensi lain yang dapat dikembangkan di sub-wilayah ini adalah agribisnis berbasis hortikultura terutama sayuran dan perkebunan.
- 7) Kabupaten Bengkulu selatan dapat berperan dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri berbasis perkebunan dan tanaman bahan pangan. Beberapa komoditi perkebunan yang memiliki potensi tinggi adalah kelapa dan kelapa sawit. Sementara tanaman bahan pangan seperti padi dan jagung telah ditetapkan pemerintah setempat sebagai komoditi unggulan, yang diintegrasikan dengan ternak sapi, dalam program agropolitan. Sektor jasa dapat pula dikembangkan untuk menjadi penghubung dengan jaringan pasar di Lampung dan Pulau Jawa melalui jalur transportasi lintas barat.
- 8) Kabupaten Seluma memiliki beberapa sentra produksi palawija terutama jagung yang berpotensi untuk dikembangkan pada skala agribisnis dan agro industri. Industri pakan ternak dengan bahan baku jagung dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan pakan ternak di Provinsi Bengkulu dan bahkan dijual keluar provinsi. Subsektor perkebunan, terutama karet dan kelapa sawit, merupakan andalan daerah ini dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.
- 9) Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang sangat tinggi sehingga dapat dikembangkan pada skala agribisnis dan industri. Perencanaan pengembangan industri perikanan laut di Kabupaten Kaur sudah dirintis sejak tahun 1996 melalui program Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU) perikanan tangkap. Daerah ini dapat juga berperan dalam pembangunan Provinsi Bengkulu melalui pengembangan subsektor perkebunan.

IV.1.4 Mewujudkan Pemanfaatan Sumber Daya alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Sumber daya alam (SDA) dan lingkungan di Provinsi Bengkulu merupakan dua komponen ekosistem yang sangat unik dibandingkan di daerah-daerah lain. Hal ini disebabkan karena kondisi geografisnya yang spesifik, yakni didominasi oleh kawasan konservasi dengan rentang ketinggian dari 0 sampai 500 m di atas permukaan laut hanya

dalam jarak kurang dari 100 km. Upaya untuk mewujudkan pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan dilakukan melalui kebijakan berikut: (a) pemanfaatan SDA pertanian dan kelautan secara berkelanjutan, (b) pembangunan kehutanan dan konservasi sumber daya air, (c) pemanfaatan sumber daya mineral dan pertambangan, (d) pengendalian SDA dan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya, dan (e) penegakkan hukum bagi keselamatan SDA dan lingkungan. Sasaran akhir dari kebijakan-kebijakan di atas adalah terwujudnya pola pemanfaatan SDA dan lingkungan secara terus menerus tanpa terjadinya degradasi yang dapat menurunkan nilai-nilai ekonomi dan non-ekonomi yang dimiliki sumber daya tersebut.

A. Pemanfaatan Sumber Daya Pertanian dan Kelautan secara berkelanjutan

Untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya pertanian dan kelautan secara berkelanjutan diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya pertanian yang tersedia di Provinsi Bengkulu dikelola sesuai dengan daya dukung dan dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan sehingga keberlanjutannya dapat terjamin.
2. Sumber daya pertanian harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal dan efisien. Sebagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya pertanian harus diinvestasikan kembali bagi menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan sumber daya tersebut bagi generasi yang akan datang.
3. Lahan merupakan komponen sumber daya pertanian yang paling rentan terhadap proses degradasi. Pemanfaatan sumber daya lahan secara berkelanjutan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan fungsi lahan sebagai media tumbuh tanaman, media penyimpan air, kawasan permukiman, dan media deposit bagi bahan-bahan yang berbahaya bagi makhluk hidup. Pengelolaan sumber daya lahan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya rehabilitasi dan pemulihan daya dukungnya sehingga produktivitasnya tetap terjaga.
4. Kebijakan tentang penataan wilayah tangkapan nelayan harus dipertegas, hal ini digunakan untuk melindungi nelayan-nelayan tradisional. Nelayan-nelayan dengan kapal yang besar yang dilengkapi dengan alat tangkap modern tidak boleh memasuki wilayah tangkapan nelayan tradisional.
5. Sumber daya pesisir dan kelautan mempunyai potensi yang besar untuk dapat dikembangkan. Produksi perikanan laut baru mencapai 17,94% dari potensi perikanan laut Bengkulu, sehingga masih dapat ditingkatkan dengan cara pemetaan alur pergerakan ikan dan daerah konsentrasi ikan. Disamping itu bantuan kepada nelayan yang berupa kapal dan alat tangkap yang lebih modern dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pembinaan dan penyuluhan secara terus menerus harus dilakukan pemerintah agar para nelayan dalam menangkap ikan di laut memperhatikan aspek kelestarian lingkungan khususnya kelestarian terumbu karang.

6. Pengembangan pesisir dan kelautan dapat diarahkan pada sektor pariwisata pantai dan laut. Pariwisata pantai dan laut yang dibangun disesuaikan dengan tataruang wilayah dan tetap harus berdasarkan pada konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan pariwisata harus melibatkan masyarakat sekitarnya sehingga akan dapat terjadi simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan masyarakat tersebut. Akibatnya pembangunan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat meningkatkan PAD.
7. Pembangunan budidaya perikanan darat sebaiknya dikembangkan azas kemitraan dengan balai pembibitan ikan dan perusahaan pakan ternak, sehingga kesulitan operasional para petani budidaya perikanan darat dapat teratasi. Disamping itu pemerintah membantu melakukan pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan cara-cara penanggulangan hama dan penyakit ikan.

B. Pembangunan Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

Untuk mewujudkan pembangunan kehutanan dan konservasi sumber daya air diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembangunan kehutanan diarahkan agar sumber daya hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya sebagai hutan lindung dan hutan produksi. Kawasan hutan lindung dikelola sedemikian rupa agar tetap memiliki fungsi-fungsi hidrologis, sebagai pencegah erosi dan sedimentasi, sebagai sumber keanekaragaman hayati, dan sebagai pengatur iklim secara global.
2. Pemanfaatan hutan produksi dilakukan dengan memperhatikan kaidah hutan sebagai komponen SDA terbarukan. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya hutan harus mengacu pada azas ekonomi, efisiensi dan keberlanjutan. Proses alih fungsi lahan pasca produksi harus disesuaikan dengan status kawasan tersebut, seperti dikembalikan sebagai kawasan hutan untuk kawasan hutan tetap, atau dikembalikan sebagai kawasan non-hutan untuk pemanfaatan kawasan hutan produksi lainnya.
3. Batas-batas wilayah hutan lindung perlu diperjelas, dengan memasang patok-patok permanen dengan jarak patok yang relatif berdekatan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kawasan hutan lindung terhadap pembukaan lahan baru oleh masyarakat yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat atas batas-batas wilayah hutan tersebut. Disamping itu bagi para petugas kehutanan dapat digunakan untuk memudahkan dalam melakukan monitoring dan pengawasan serta evaluasi yang hasilnya dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan kehutanan.
4. Penataan ulang batas-batas wilayah, termasuk kawasan hutan dilakukan dengan menggunakan garis ordinat maupun batas alam (seperti sungai). Batas alam digunakan untuk memudahkan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya hutan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah.
5. Pengelolaan dan konservasi sumber daya air diarahkan untuk menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air (*catchment area*) dan meningkatkan keberadaan air tanah. Daerah tangkapan air harus dipertahankan sedemikian rupa sehingga mampu

menjadi penampung air di musim hujan dan sekaligus sebagai penyalur air di musim kemarau. Sasaran dari pelestarian daerah tangkapan air adalah agar debit air permukaan (sungai dan danau) dapat dipertahankan pada kondisi yang relatif stabil. Sementara keberadaan air tanah, baik air tanah dangkal (*soil water*) maupun air tanah dalam (*ground water*), dapat dipertahankan melalui pelestarian kawasan hijau dan pembuatan daerah resapan di kawasan permukiman sehingga proses infiltrasi air hujan ke dalam tanah menjadi efektif.

6. Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air tanah perlu diwujudkan melalui dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan pasokan (*supply management*) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pasokan air. Kedua adalah pendekatan kebutuhan (*demand management*) yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air oleh masyarakat.
7. Penetapan peruntukan sungai-sungai yang ada di Bengkulu perlu dilakukan melalui Peraturan Daerah. Peruntukan sungai ini terdiri dari peruntukan sungai untuk kebutuhan air minum, pertanian, peternakan dan industri. Dengan penetapan peruntukan sungai tersebut maka kualitas air permukaan (air sungai) dapat dipertahankan sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu memudahkan aparat pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan monitoring di lapangan.
8. Kelembagaan sumber daya air perlu diperkokoh guna meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM yang ada dalam lembaga pengelola sumber daya air.
9. Penegakan hukum terhadap pengelolaan sumber daya hutan melalui hukum positif, didukung juga dengan tatanan yang berlaku bagi masyarakat adat disekitar kawasan hutan (kearifan lokal).

C. Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Secara Berkelanjutan

Untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya mineral dan pertambangan secara berkelanjutan diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sumber daya mineral dan pertambangan merupakan jenis SDA yang tidak terbarukan sehingga pemanfaatannya harus dilakukan sehemat mungkin. Pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlukan sebagai input untuk proses produksi berikutnya dengan nilai tambah yang lebih besar.
2. Reklamasi bekas kegiatan pertambangan harus dilakukan oleh perusahaan dimana pengawasan dan evaluasinya dilakukan oleh pemerintah. Reklamasi dilakukan secara bertahap sampai akhirnya lahan tersebut dapat ditanami dengan jenis tanaman lokal. Apabila kegiatan ini tidak dilakukan oleh perusahaan maka pemerintah harus melakukan reklamasi dengan menggunakan dana jaminan reklamasi dari perusahaan yang diberikan kepada pemerintah sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Dengan dilakukannya reklamasi ini maka kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan SDA tersebut dapat ditanggulangi.

3. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya mineral dan pertambangan diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan cara menginvestasikannya pada sektor-sektor lain yang memiliki produktivitas tinggi. Selain itu, sebagian hasil dan pendapatan tersebut harus digunakan untuk kegiatan reklamasi dan konservasi terutama terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan kedua kelompok SDA tersebut.
4. Sebagian hasil dan pendapatan dari pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan juga harus digunakan untuk pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif yang terbarukan seperti biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut dan tenaga angin. Dengan demikian, upaya pemanfaatan sumber daya mineral dan pertambangan dapat dilakukan melalui upaya penganekaragaman sumber energi dan konservasi energi dengan memperhatikan pengendalian lingkungan hidup

D. Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup Sesuai dengan Daya Dukungnya

Untuk mewujudkan pengendalian SDA dan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kebijakan penataan lingkungan yang sesuai dengan daya dukungnya diarahkan pada upaya tertatanya wilayah dan ruang di Provinsi Bengkulu sehingga pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan daya dukung lingkungan yang tersedia. Daerah-daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa kawasan konservasi perlu mendapat perhatian khusus dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan yang berwawasan konservasi SDA dan lingkungan. Kebijakan ini perlu diambil agar daerah-daerah tersebut tidak hanya dibebani untuk melestarikan SDA dan lingkungan, tetapi juga diberi kesempatan untuk berkembang secara ekonomi, sosial dan kemasyarakatan.
2. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dikendalikan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan yang baik. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus diterapkan di segala bidang. Pembangunan ekonomi pemanfaatan SDA dan jasa yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi lingkungan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan guna menunjang pembangunan berkelanjutan.
3. Secara geografis Provinsi Bengkulu sangat rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Mitigasi bencana alam diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan penerapan system deteksi dini, dan melakukan sosialisasi tentang bencana alam kepada masyarakat. Daerah-daerah rawan bencana alam dipetakan untuk mempermudah antisipasi secara dini sebelum bencana terjadi.

E. Penegakan Hukum Bagi Keselamatan SDA dan Lingkungan

Untuk mewujudkan penegakan hukum bagi keselamatan SDA dan lingkungan diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum bagi keselamatan SDA dan lingkungan diarahkan pada terciptanya jaminan penegakan hukum bagi kelestarian SDA dan lingkungan sehingga tetap tersedia bagi generasi berikutnya. Hukum bagi keselamatan SDA dan lingkungan harus ditegakkan secara adil dan tegas sehingga perlu didukung oleh sistem politik yang kredibel.
2. Kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan perlu ditingkatkan, terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta generasi yang peduli terhadap isu-isu SDA dan lingkungan. Keunikan SDA dan lingkungan yang dimiliki Provinsi Bengkulu, seperti keanekaragaman hayati dan daerah-daerah tangkapan air, hendaknya dijadikan laboratorium lapangan bagi generasi muda sehingga mereka dapat memahami akan pentingnya pelestarian SDA dan lingkungan. Generasi muda yang sadar lingkungan diharapkan dapat menjadi penggerak utama pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang.

IV.1.5. Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Demokratis

Terselenggaranya pemerintahan daerah yang adil dan demokratis berlandaskan hukum adalah landasan penting untuk tercapainya pembangunan yang maju sesuai dengan visi dan misi daerah. Adil dan demokratis akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah dan memaksimalkan potensi masyarakat serta transparansinya. Upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis dan adil dilakukan dengan mendorong untuk memantapkan pelembagaan demokrasi di daerah yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat ; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

A. Melakukan penyempurnaan Struktur Politik dan Pelembagaan Demokrasi di Daerah

Untuk melakukan penyempurnaan struktur politik dan pelembagaan demokrasi di Daerah diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dipromosikan dan disosialisasikan agar lebih kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi berkelanjutan. Kinerja lembaga-lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan secara kontinyu, sementara pelembagaan demokrasi perlu diciptakan di daerah untuk mendukung berlangsungnya pelaksanaan demokrasi secara berkelanjutan.
2. Penataan peran daerah dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat, dan pembentukan kelas menengah yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Di samping itu, penataan peran daerah dan masyarakat diarahkan pada penataan fungsi-fungsi yang positif dari pranata-

pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik di daerah untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menanggulangi berbagai potensi konflik politik dan sosial yang terjadi.

3. Penataan proses politik dititikberatkan pada proses pengalokasian atau representasi kekuasaan yang diwujudkan dengan peningkatan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik, diikuti dengan perwujudan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa yang bertanggung jawab, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing dengan rasa penuh tanggung jawab.
4. Pengembangan budaya politik dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis yang diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, kesetaraan gender, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media, dan upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.
5. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan: (a) perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pembangunan daerah secara cerdas dan demokratis; (b) perwujudan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen; (c) perwujudan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi di daerah dan mencegah monopoli informasi; (d) penciptaan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik; (e) penciptaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh *link* informasi yang ada di pelosok daerah sebagai suatu keputusan yang mampu mengikat dan memperluas integritas daerah; dan (f) pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada seluruh masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman informasi.

B. Menegakkan Supremasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Untuk menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mendorong pembangunan struktur hukum di daerah yang diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum dan badan peradilan sehingga aparat hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Kualitas dan kemampuan aparat hukum dikembangkan melalui peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan.

2. Sikap aparaturnya hukum perlu dikembangkan agar menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan. Aparatur hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional perlu didukung oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai. Oleh karena itu, kesejahteraan aparaturnya hukum perlu diperbaiki agar di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak lain.
3. Penerapan dan penegakan hukum dan HAM dilaksanakan secara tegas, lugas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap HAM, keadilan dan kebenaran, sehingga mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas daerah yang mantap dan dinamis.
4. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses yang terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan akses kepada masyarakat terhadap partisipasi dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
5. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN.
6. Pembangunan hukum yang dilaksanakan di Provinsi Bengkulu diarahkan pada kebutuhan yang bisa menampung aspirasi masyarakat, kebutuhan dawah, dan mampu mempersempit peluang untuk melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, materi Peraturan Daerah yang dibuat harus tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum adat yang berlaku dan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan, penegakan hukum dan HAM peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan.
7. Keamanan daerah di Provinsi Bengkulu diwujudkan melalui keterpaduan antara pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah yang berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial dan budaya serta berwawasan nusantara.

8. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut daerah dalam upaya melindungi sumberdaya laut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Peningkatan peran serta masyarakat telah mendukung terwujudnya dan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas moral dan keimanan penyelenggara negara dan anggota masyarakat termasuk prioritas utama dalam upaya mengatasi kondisi Provinsi Bengkulu pada beberapa bidang yang bermasalah, di antaranya pendidikan, kesejahteraan rakyat, hukum dan keadilan, agama, budaya, dan akibat merajalelanya korupsi di hampir seluruh bidang. Aspek moral dan keimanan diharapkan menjadi benteng pengaman bagi perilaku aparat di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memberikan layanan agar mencapai kemajuan yang diharapkan dan menghindarkan efek negatif bagi generasi penerus dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya perlu dilakukan kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara dilakukan melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
3. Sistem pemerintahan yang baik memerlukan etika birokrasi dan budaya kerja yang tinggi. Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja perlu diikuti dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.

IV. 2 Tahapan dan Skala Prioritas

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, maka pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan tersebut mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda tetapi harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dalam 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan sebagai prioritas dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas lagi menjadi prioritas utama.

V. 2. 1 RPJMD ke-1 (2005-2010)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke-1 diarahkan untuk membangun Provinsi Bengkulu disegala bidang dan ditunjukkan demi terwujudnya Provinsi Bengkulu yang berubah lebih maju, bermartabat, lebih sejahtera dan bebas korupsi dengan landasan iman dan taqwa serta industri rakyat sebagai penggerak utamanya.

Provinsi Bengkulu yang berubah lebih maju ditandai dengan berubahnya Provinsi Bengkulu secara berkelanjutan dari ketertinggalannya, bangkit menuju perekonomian rakyat yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Perekonomian yang akan dibangun tersebut bertumpu pada pengembangan industri rakyat. Provinsi Bengkulu yang maju, bermartabat, sejahtera dan bebas korupsi akan tercapai apabila masyarakatnya memiliki iman dan taqwa yang kuat.

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya, memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat, dengan menggali dan mengoptimalkan *resource base*: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan akses market baik lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat, sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-usaha yang dikembangkan oleh rakyat. Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong tumbuhkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan kebutuhan pokok masyarakat di semua daerah. Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha yang dikembangkan.

Agenda meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan pada berbagai aspek kehidupan, didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, memayungi semua kebijakan, program dan pembangunan daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pendidikan ditunjukkan untuk menjadikan sistem pendidikan yang ada mampu mendidik SDM menjadi disiplin, nasionalis, cerdas teori dan terampil berkarya. Pembangunan pendidikan dalam 5 tahun pertama harus mampu mengubah pendidikan untuk dapat mendukung akselerasi pembangunan daerah menjadi maju, makmur dan bebas KKN. Sistem pendidikan di daerah diarahkan agar demokratis dan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk memperoleh pendidikan di sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Pembangunan pendidikan 5 (lima) tahun pertama juga harus mampu mewujudkan Bengkulu sebagai kota pelajar. Pembangunan kesehatan ditunjukkan untuk meningkatkan akses dan kualitas kesehatan.

Pembangunan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial pada seluruh masyarakat.

Agenda mengembangkan sarana dan prasarana daerah untuk mendukung pencapaian masyarakat yang sejahtera, adil, produktif dan kompetitif, memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur di dalam mendukung pengembangan industri rakyat, termasuk infrastruktur transportasi, irigasi, komunikasi dan telematika. Disamping itu, pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar air bersih, penerangan, perumahan dan sanitasi lingkungan.

Agenda menyelenggarakan pemerintahan yang merakyat secara professional, transparan, akuntabel, sinergi, bersih dan berwibawa bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan tatalaksana pemerintahan yang bersih dan baik dengan jalan memberi teladan dan berani memberantas korupsi. Tata pemerintahan yang efektif dan efisien dilakukan dengan menempatkan SDM yang *the right man on the right place* dalam jajaran birokrasi pemerintah dan lembaga ekonomi daerah. Tata pemerintahan dalam lima tahun pertama juga harus partisipatoris, responsif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan jalan membangun kepercayaan (trust) dan budaya kerja keras serta disiplin tinggi. Tata pemerintahan tersebut juga harus mampu mempersuasi dan memotivasi rakyat untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki secara tegas dan cermat.

Agenda mendorong berkembangnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan religius, memayungi semua kebijakan, program kegiatan pembangunan moral masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai budaya dan agama sebagai landasannya. Tatanan masyarakat yang bermoral, berbudaya dan religius dicirikan oleh pola kehidupan sehari-hari yang saling menghargai satu sama lain termasuk kerukunan hidup umat intern dan antar agama, serta terbebas dari praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti prostitusi, narkoba, minuman keras, perjudian, korupsi, kolusi dan nepotisme. Nilai-nilai agama dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan terutama yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.

Agenda mewujudkan sistem politik dan hukum yang mempertahankan dan mengayomi masyarakat, serta mampu membawa kemajuan dan stabilitas daerah, memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah agar tercipta stabilitas dan memerankan daerah melalui otonomi daerah secara konsekwen dan bertanggung jawab. Sistem politik yang ada didorong agar mampu menyerap aspirasi rakyat melalui komunikasi politik antara suprastruktur, infrastruktur dan substruktur politik. Pembangunan politik 5 (lima) tahun pertama harus mampu mendorong pemberdayaan rakyat sebagai subjek pembangunan melalui pelibatan secara legal dan terorganisir di lembaga legislatif maupun infrastruktur politik. Pembangunan politik juga harus mampu memberikan pendidikan politik melalui jalur-jalur komunikasi yang dapat mencerdaskan rakyat. Pembangunan bidang hukum 5 (lima) tahun pertama harus mampu menjadikan sistem hukum mampu mengatur, membela dan mengayomi rakyat; dapat meningkatkan dan martabat rakyat; dan mampu memantapkan kesadaran akan hak dan kewajiban rakyat; serta menjadikan sistem hukum yang mampu menjamin terselenggaranya kepastian hukum yang jujur, adil dan konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Agenda menumbuhkembangkan budaya kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tata sosial budaya yang melandaskan pada iman dan taqwa, didukung tata nilai moral yang beradab dan demokratis, serta bebas dari tekanan dan rasa ketakutan. Tata sosial budaya yang dituju adalah tatanan yang mampu menjamin harmonisasi hubungan antar suku bangsa, agama, ras dan golongan secara damai, aman dan tenteram. Tata sosial budaya yang dituju juga harus mampu mengangkat citra masyarakat yang disiplin, inovatif dan produktif, serta mampu mengembangkan keanekaan budaya daerah untuk didorong menjadi komunitas yang *marketable*.

Agenda mendorong terciptanya sistem pertahanan dan keamanan daerah yang mampu menangkal disintegrasi bangsa, menjamin keutuhan NKRI, serta keamanan dan ketertiban masyarakat, memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah untuk meningkatkan kemampuan menangkal ancaman yang dapat memuat disintegrasi bangsa dan wilayah (daerah) Bengkulu lepas dari NKRI, mampu menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (daerah) melalui perlindungan masyarakat secara terintegrasi dan menyeluruh, serta dapat mempertebal rasa persatuan dan cinta tanah air Indonesia melalui bela negara.

Pokok-pokok kebijakan yang telah dilaksanakan selama periode 2005-2008, meliputi memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya. Pembangunan industri Rakyat dilakukan untuk mengembangkan industri kecil menengah yang berbasis pertanian, perikanan dan kalautan, kehutanan dan pertambangan. Sedangkan sektor pariwisata dikembangkan untuk mendukung dan mempercepat perkembangan industri rakyat, melalui penumbuhan pasar yang diharapkan berkembang lebih cepat dengan berkembangnya pariwisata di Provinsi Bengkulu. Sektor pariwisata adalah sebagai sarana peningkat akses market baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Pembangunan pariwisata yang dilakukan dengan menerapkan konsep pembangunan wisata inti yang memiliki sarana dan prasarana yang modern, didukung oleh wisata-wisata domestik dan manca negara yang berfungsi sebagai pendukung dalam rangka memberikan lebih banyak alternatif kepada pengguna jasa wisata. Kebijakan penting lainnya adalah peningkatan kualitas SDM, mempercepat pembangunan infrastruktur peningkatan perekonomian masyarakat terutama melalui perikanan, kehutanan, dan revitalisasi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan), peningkatan pengelolaan SDA & lingkungan hidup, serta mitigasi bencana, pembangunan tata pemerintah yang baik, pembangunan sosial budaya daerah & pemahaman nilai-nilai keagamaan.

IV. 2.1 RPJM ke-2 (2010-2015)

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke- 1, maka RPJMD ke-2 ditunjuk untuk lebih memantapkan penataan kembali Provinsi Bengkulu di segala bidang terutama dengan lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul dan bertaqwa termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian daerah.

Peningkatan kesejahteraan rakyat diupayakan demi membaiknya indikator pembangunan SDM, yang meliputi meningkatnya pendapatan per kapita; menurut angka kemiskinan dan tingkat pengangguran; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Provinsi Bengkulu; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.

Peningkatan daya saing perekonomian diupayakan melalui pemberdayaan dan penguatan industri rakyat sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam sesuai dengan potensi daerah secara terpadu. Peningkatan pembangunan perekonomian perlu dukungan kuat pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu juga didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Bidang industri kelautan yang meliputi perhubungan laut. Industri maritim, pikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, lingkungan hidup, dan mitigasi bencana yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpelihara keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang; peningkatan pembangunan kelembagaan dan kapasitas partisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkat pemerintah; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas peningkatan perencanaan tata ruang serta konsisten pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Peningkatan kelembagaan politik dan hukum dalam upaya terwujudnya konsolidasi dekonsentrasi dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia terus diupayakan; peningkatan pembangunan tata pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; peningkatan pembangunan masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri dan kokoh dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, Adil dan demokratis.

IV.2.1. RPJM Ke-3 (2015-2020)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditunjukkan untuk lebih memanfaatkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu terus meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumberdaya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesejahteraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta, kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan perekonomian secara serasi, seimbang dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Peningkatan pemantapan pembangunan kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan dan disertai partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana alam.

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat, terutama industri rakyat berbasis sumber daya lokal meliputi pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; peningkatan pasokan tenaga listrik yang lebih optimal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat teratasi dengan baik; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh

masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

Pembangunan kelembagaan politik dan hukum terus ditingkatkan dan diupayakan dalam rangka terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; peningkatan pembangunan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral lebih ditingkatkan demi terwujudnya masyarakat Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan demokratis.

IV.2.1 RPJM ke-4 (2020-2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3 ,RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan **Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil, demokratis bertumpu pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh**, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, unggul dan bertaqwa serta berdaya saing.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sumber daya manusia Provinsi Bengkulu yang unggul dan bertaqwa adalah sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta mitigasi bencana untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi, pos dan telematika yang handal; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa adil dan demokratis, aman dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil, dan demokratis bertumpu pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi pemerintah Provinsi Bengkulu dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

RPJPD Provinsi Bengkulu ini juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD kabupaten/kota selingkung Provinsi Bengkulu dan menjadi pedoman bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan pembangunan daerah untuk mewujudkan visi **Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil, dan demokratis bertumpu pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsisten kebijakan pemerintah daerah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

GUBERNUR BENGKULU

AGUSRIN M. NAJAMUDIN